

Kode>Nama Rumpun Ilmu: 185/Agribisnis

**LAPORAN PENELITIAN
HIBAH BERSAING PERGURUAN TINGGI
Tahun Anggaran 2013**



**ANALISIS DAMPAK PAJAK DAERAH TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI
(STUDI KASUS DI PROVINSI JAWA TENGAH)**

TIM PENELITI

Drs. Jan Hotman, M.Si /0013026402

Dr. Ir. Adolf B. Heatubun, M.Si /0014116307

**UNIVERSITAS TERBUKA
MARET 2013**

**HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN HIBAH BERSAING**

Judul Penelitian : Analisis Dampak Pajak Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus di Provinsi Jawa Tengah)

Kode>Nama Rumpun Ilmu : 185/Agribisnis

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap : Drs. Jan Hotman, M.Si
b. NIDN : 0013026402
c. Jabatan Fungsional : Lektor
d. Program Studi : Agribisnis
e. Nomor HP : 081213847364
f. Alamat email : hotman@ut.ac.id

Anggota Peneliti

a. Nama Lengkap : Dr. Ir. Adolf B. Heatubun, M.Si
b. NIDN : 0014116307
c. Perguruan Tinggi : Universitas Patimura
Lama Penelitian keseluruhan : 2 tahun
Penelitian Tahun ke_ : 1
Biaya Penelitian Keseluruhan : Rp. 90.900.000.,
Biaya Tahun Berjalan : Diusulkan ke DIKTI Rp. 45.670.000.,

Pondok Cabe, Maret 2013
Ketua Peneliti,



Drs. Jan Hotman, M.Si
NIP. 19640213 199103 1 002



DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Pengesahan	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
RINGKASAN	vi
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	2
1.3. Tujuan Penelitian	3
1.4. Kontribusi Penelitian	3
II. TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1. Pajak Daerah	4
2.2. Pendapatan Asli Daerah	4
2.3. Pengeluaran Pemerintah	6
2.3.1. Teori Pengeluaran Pemerintah	6
2.3.2. Klasifikasi Pengeluaran Pemerintah	9
2.4. Pengaruh PAD dan Pajak Daerah terhadap Belanja Daerah	11
2.5. Pengaruh Produk Domestik Bruto terhadap Pengeluaran Pemerintah	12
III. METODOLOGI PENELITIAN	13
3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian	13
3.2. Jenis dan Sumber Data	13
3.3. Model	13
3.3.1. Perumusan Model	14
3.3.2. Identifikasi Model dan Metode Estimasi	15
3.3.3. Validasi Model	15
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	17
4.1. Perkembangan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah.....	17
4.1.1. Penerimaan Pajak Daerah	17
4.1.2. Pendapatan dan Pengeluaran Pemerintah Daerah	18

4.1.3. Pertumbuhan Investasi Daerah	20
4.1.4. Inflasi dan Uang Beredar	22
4.1.5. Penyerapan Tenaga Kerja, Jumlah Kegiatan Ekonomi, dan Produksi	24
4.2. Pendugaan Model Fungsi Pajak	26
4.2.1. Keragaan Umum Pendugaan Model	26
4.2.2. Perilaku dan Kapasitas Peubah Penentu Fungsi Pajak	28
4.2.2.1. Rencana Penerimaan Pemerintah Daerah	28
4.2.2.2. Pengeluaran Pemerintah	30
4.2.2.3. Penanaman Modal Dalam Negeri	32
4.2.2.4. Penanaman Modal Asing	35
4.2.2.5. Jumlah Uang Beredar	38
4.2.2.6. Indeks Harga Konsumen	40
4.2.2.7. Jumlah Unit Usaha	41
4.2.2.8. Penyerapan Tenaga Kerja	43
4.2.2.9. Produk Domestik Regional Bruto	45
4.3. Validasi Model dan Simulasi	48
4.3.1. Validasi Model	48
4.3.2. Hasil Simulasi Fungsi Pajak dan Dampak Perubahan	49
4.3.2.1. Peningkatan Nilai Pajak Kendaraan Bermotor	49
4.3.2.2. Peningkatan Nilai Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	52
4.3.2.3. Peningkatan Nilai Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	55
4.3.2.4. Peningkatan Nilai Pajak Daerah	57
V. KESIMPULAN DAN SARAN	61
5.1. Kesimpulan	61
5.2. Saran dan Implikasi Kebijakan	61
DAFTAR PUSTAKA	62

DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
1. Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Tengah, Tahun 1980 – 2011	17
2. Perkembangan Pendapatan dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, Tahun 1980 – 2011.....	19
3. Perkembangan Investasi Langsung Asing dan Investasi Dalam Negeri di Provinsi Jawa Tengah, Tahun 1980 – 2011.....	21
4. Perkembangan Inflasi dan Jumlah Uang Beredar di Provinsi Jawa Tengah, Tahun 1980 – 2011.....	23
5. Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja, Lapangan Usaha, dan Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Jawa Tengah, Tahun 1980 – 2011.....	25
6. Hasil Pendugaan Parameter Peubah Rencana Penerimaan Pemerintah (REVGGOV).....	28
7. Hasil Pendugaan Parameter Peubah Pengeluaran Pemerintah (EGOV)	30
8. Hasil Pendugaan Parameter Peubah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).....	32
9. Hasil Pendugaan Parameter Peubah Penanaman Modal Asing (PMA)	35
10. Hasil Pendugaan Parameter Peubah Jumlah Uang Beredar (MS)	38
11. Hasil Pendugaan Parameter Peubah Indeks Harga Konsumen (IHK)	40
12. Hasil Pendugaan Parameter Peubah Jumlah Unit Usaha (USHA)	41
13. Hasil Pendugaan Parameter Peubah Penyerapan Tenaga Kerja (TK)	44
14. Hasil Pendugaan Parameter Peubah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	46
15. Hasil Validasi Model Fungsi Pajak	48
16. Hasil Simulasi Dampak Peningkatan Nilai Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Sebesar 20 %)......	50
17. Hasil Simulasi Dampak Peningkatan Nilai Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Sebesar 20 %)......	53
18. Hasil Simulasi Dampak Peningkatan Nilai Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Sebesar 20 %)......	55
19. Hasil Simulasi Dampak Peningkatan Nilai Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Masing-masing Sebesar 20 %.....	58

DAFTAR GAMBAR

Nomor		Halaman
1.	Trend Realisasi Penerimaan Pajak Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Tengah, 12 Tahun Terakhir (2000 – 2011) (dalam juta rupiah)	18
2.	Trend Alokasi Anggaran untuk Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, 12 Tahun Terakhir (2000 – 2011) (dalam juta rupiah)	20
3.	Trend Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, dan Total Investasi Daerah Provinsi Jawa Tengah, 12 Tahun Terakhir (2000 – 2011) (dalam juta rupiah).....	22
4.	Trend Inflasi dan Jumlah Uang Beredar di Provinsi Jawa Tengah, 12 Tahun Terakhir (2000 – 2011)).....	23
5.	Trend Penyerapan Tenaga Kerja, Lapangan Usaha, dan PDRB Provinsi Jawa Tengah, 12 Tahun Terakhir (2000 – 2011)	25

RINGKASAN

Judul “Analisis Dampak Pajak Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Studi Kasus di Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2013. Pajak memiliki arti dan peran penting bagi Negara karena merupakan sumber penerimaan utama bagi Negara dan digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan Negara. Penerimaan Pajak bersumber dari masyarakat yang merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta langsung masyarakat terhadap penyelenggaraan Negara dan pembangunan nasional. Berkat bantuan penerimaan pajak, pelaksanaan pembangunan nasional maupun pembangunan di daerah telah menghasilkan perkembangan yang pesat di bidang ekonomi yaitu kegiatan ekonomi masyarakat mengalami peningkatan dan kemajuan, dan kesejahteraan masyarakat makin bertambah tinggi.

Beberapa fungsi utama pajak dalam mendukung pembangunan di daerah adalah *pertama* fungsi pajak sebagai *budgetair* yaitu untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. *Kedua*, fungsi *mengatur* yaitu menggiring investor menanamkan modalnya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. *Ketiga*, fungsi *stabilisasi* yaitu untuk mengendalikan inflasi guna menjaga kestabilan ekonomi. *Keempat*, fungsi *distribusi* yaitu untuk membuka kesempatan kerja sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Sesuai fungsi-fungsi pajak di atas jika terjadi kesalahan baik dalam pengelolaan maupun pelaksanaannya, akan mengurangi bahkan menghilangkan fungsi yang diemban pajak sehingga harapan sesuai fungsi pajak tidak terwujud. Menjadi permasalahan adalah seberapa besar kemampuan fungsi-fungsi *budgetair*, *regulered* (mengatur), *stabilisasi* dan *distribusi* pajak tercipta dalam perekonomian daerah dan seberapa besar kemampuan pajak mendorong pertumbuhan ekonomi daerah?

Tujuan penelitian ini adalah (1) Menganalisis pengaruh penerimaan pajak dalam pembangunan daerah dilihat dari sisi fungsi *budgetair*, *regulered*, *stabilisasi*, dan *distribusi* pajak serta pengaruh penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Regional Bruto, dan (2) Menganalisis dampak peningkatan pajak terhadap fungsi *budgetair*, *regulered*, *stabilisasi*, dan *distribusi* pajak, dan terhadap Produk Domestik Regional Bruto. Penelitian direncanakan dilaksanakan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013.

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak memiliki arti dan peran penting bagi sebuah Negara. Pajak merupakan sumber penerimaan utama bagi Negara dan digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan Negara. Negara dapat terselenggara berkat pendanaan yang tersedia bersumber dari penerimaan pajak masyarakat. Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta langsung masyarakat yang secara bersama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional. Pada posisi ini pajak yang memiliki peran membiayai penyelenggaraan Negara, juga menghadirkan peran masyarakat dalam pembangunan sebagai pembayar pajak.

Bila dicermati pelaksanaan pembangunan nasional maupun pembangunan di daerah telah menghasilkan perkembangan yang pesat dalam kehidupan nasional dan daerah, khususnya di bidang ekonomi. Pesatnya perkembangan sosial ekonomi sebagai hasil pembangunan di berbagai bidang, disadari bersumber dari dukungan pajak bagi pembiayaan pembangunan. Hasil dari dukungan pajak tersebut adalah kegiatan ekonomi masyarakat mengalami peningkatan dan kemajuan, dan kesejahteraan masyarakat makin bertambah tinggi.

Arti penting lainnya dari pajak adalah pajak mampu membangun kemandirian bangsa dalam pembiayaan Negara dan pembangunan. Kemampuan penerimaan pajak yang kuat akan menyediakan kesanggupan pemerintah membangun dan merencanakan pembangunan ke depan. Fakta bahwa dalam era persaingan antara Negara yang semakin ketat hingga saat ini, pajak tetap digunakan sebagai salah satu instrumen penting untuk membangun keunggulan-keunggulan strategis yang ada pada suatu Negara. Dari pajak inilah Negara membiayai kegiatan-kegiatan administrasi pemerintahan, angkatan perang dan pembangunan (Miyasto, 1997).

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah daerah dengan potensi penerimaan pajak yang besar. Bank Indonesia (2012) melaporkan bahwa penerimaan pajak di Provinsi Jawa Tengah ditargetkan mencapai Rp. 10,8 triliun. Target tersebut disesuaikan dengan target pajak pada APBN yakni dari Rp. 885 triliun. Realisasi penghimpunan pajak hingga 30 April 2012 mencapai 29%. Realisasi anggaran atau tingkat serapan APBD Provinsi Jawa Tengah pada triwulan I-2012 sebesar 9,22% dari Rp7,33 triliun. Realisasi APBD tersebut digunakan untuk belanja langsung (Rp.109 miliar) dan belanja pegawai atau pembayaran gaji (Rp.725 miliar). Realisasi penerimaan pajak disatu sisi dan alokasinya untuk untuk

penyelenggaraan Negara umumnya dan Pemerintah Daerah khususnya, akan menunjukkan seberapa jauh peran pajak mendukung penyelenggaraan dimaksud dan pembangunan ke depan.

1.2. Perumusan Masalah

Sesuai fungsinya, pajak memiliki peran utama dalam menggerakkan pembangunan. Beberapa fungsi utama pajak dalam mendukung pembangunan di daerah adalah sebagai berikut. *Pertama*, fungsi pajak sebagai *budgetair* menetapkan pajak menjadi sumber pendapatan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. Melalui fungsi ini, pemerintah dapat menjalankan tugas-tugas rutin Negara dan melaksanakan pembangunan.

Kedua, fungsi pajak sebagai “regulated” (fungsi mengatur) memungkinkan pemerintah menggunakan pajak sebagai alat atau kebijakan untuk menggiring investor baik dalam negeri maupun luar negeri menanamkan modalnya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. *Ketiga*, fungsi pajak sebagai *stabilisasi* mendukung pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. *Keempat*, fungsi pajak sebagai “distribusi” mendukung pemerintah dalam membiayai kegiatan pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Jika dicermati, fungsi-fungsi pajak di atas merupakan kesatuan peran yang diembankan oleh instrumen pajak untuk wujud dalam perekonomian daerah. Oleh karena itu jika terjadi kesalahan baik dalam pengelolaan maupun pelaksanaannya, sudah tentu akan mengurangi bahkan menghilangkan fungsi yang diembankan pajak sehingga harapan sesuai fungsi pajak menjadi tidak terwujud.

Berdasarkan fungsi dan peran penting pajak di atas, penelitian yang akan dilaksanakan di Provinsi Jawa Tengah ini membuat beberapa rumusan masalah untuk dijawab dalam penelitian ini adalah (1) seberapa besar fungsi *budgetair* pajak tercipta dalam perekonomian daerah dilihat dari kemampuannya untuk membentuk rencana penetapan anggaran dan jumlah anggaran pengeluaran pemerintah daerah dalam pembangunan, (2) seberapa besar fungsi *regulated* pajak tercipta dalam perekonomian daerah dilihat dari kemampuannya untuk menciptakan Penanaman Investasi Asing (PMA) dan Penanaman Investasi Dalam Negeri (PMDN) di daerah, (3) seberapa besar fungsi *stabilisasi* pajak tercipta dalam perekonomian daerah dilihat dari kemampuannya untuk menciptakan uang beredar dalam perekonomian daerah dan mengendalikan inflasi, dan (4) seberapa besar fungsi *distribusi* pajak tercipta dalam perekonomian daerah dilihat dari

kemampuannya untuk membuka lapangan kerja dan jumlah penyerapan tenaga kerja dalam perekonomian daerah, dan (5) seberapa besar kemampuan pajak mendorong pertumbuhan ekonomi daerah Jawa Tengah?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, maka penelitian di Provinsi Jawa Tengah ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Menganalisis pengaruh penerimaan pajak dalam pembangunan daerah dilihat dari sisi fungsi *budgetair*, *regulered*, *stabilisasi*, dan *distribusi* pajak serta pengaruh penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Regional Bruto.
2. Menganalisis dampak peningkatan pajak terhadap fungsi *budgetair*, *regulered*, *stabilisasi*, dan *distribusi* pajak, dan terhadap Produk Domestik Regional Bruto.

1.4. Kontribusi Penelitian

Hasil penelitian ini akan berkontribusi beberapa hal antara lain :

1. Memberikan informasi mengenai besaran fungsi pajak tercipta dalam perekonomian daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Memberikan informasi mengenai dampak peningkatan pajak terhadap sisi fungsi *budgetair*, *regulered*, *stabilisasi*, dan *distribusi* pajak, dan terhadap Produk Domestik Regional Bruto.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pajak Daerah

Pengertian pajak menurut Brotodihardjo (2003) adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan kepada wajib pajak untuk membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali. Iuran ini ditujukan untuk digunakan membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pengertian pajak menurut Sommerfeld *dalam* Muqodim (1999) adalah suatu pengalihan sumber-sumber yang wajib dilakukan dari sektor swasta kepada sektor pemerintah berdasarkan peraturan tanpa suatu imbalan kembali yang langsung dan seimbang. Pajak ini dimaksudkan agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya dalam menjalankan pemerintahan.

Pengertian Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, RI, 2009). Sesuai Undang-undang ini pajak daerah terdiri atas dua jenis yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi mencakup pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Sedangkan pajak kabupaten/kota mencakup Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa sumber penerimaan daerah berasal dari 4 (empat) sumber yaitu :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), antara lain berasal dari :
 1. Hasil pajak daerah
 2. Hasil retribusi daerah
 3. Hasil perusahaan milik daerah
 4. Hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan (antara lain bagian laba dari BUMD, dan jasa kerja sama dengan pihak ketiga)

5. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah (jasa giro, dan hasil penjualan asset daerah).
- b. Dana Perimbangan, yang sesuai pasal 6 ayat (1) UU No. 33 Tahun 2004, terdiri dari 3 (tiga) bagian yang merupakan satu kesatuan elemen sumber pembiayaan untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan kewenangan oleh daerah, antara lain :
 1. Dana Alokasi Umum (DAU), yang pendistribusiannya didasarkan pada suatu rumus, yang mempunyai tujuan pemerataan dengan memperhatikan potensi dan kebutuhan penduduk, dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah (seperti luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah) sehingga diharapkan perbedaan antara daerah yang maju dengan daerah yang belum berkembang dapat diperkecil.
 2. Dana Alokasi Khusus (DAK), yang dialokasikan untuk membiayai kebutuhan khusus daerah dengan memperhatikan ketersediaan dana dalam APBN, dan
 3. Bagian Daerah (Bagi Hasil) dari Penerimaan PBB, BPHTB, PPh Perseorangan dan penerimaan Sumber Daya Alam (SDA), merupakan komponen dana perimbangan yang pendistribusiannya dilakukan berdasarkan potensi daerah penghasil (Syaukani, Gaffar, dan Rasyid, 2002).
 - c. Dana pinjaman daerah, yaitu dana yang dapat diperoleh dari pinjaman baik dalam maupun luar negeri untuk membiayai sebagian anggaran pembangunan daerah.
 - d. Lain-lain penerimaan yang sah (lain-lain pendapatan yang sah antara lain hibah atau dana darurat dari Pemerintah).

Pentingnya PAD disebutkan secara tegas dalam ketentuan Undang-undang tersebut bahwa PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Biaya penyelenggaraan otonomi daerah harus ditanggung oleh daerah melalui APBD. Daerah harus mampu menggali sumber-sumber keuangan yang ada di daerah, di samping didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antara propinsi dan kabupaten/kota.

Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa hampir di semua daerah prosentase PAD relatif kecil. Pada umumnya APBD suatu daerah didominasi oleh sumbangan pemerintah pusat dan sumbangan-sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini menyebabkan daerah sangat tergantung kepada pemerintah pusat, sehingga kemampuan daerah untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki menjadi sangat terbatas. Rendahnya PAD dari suatu daerah bukanlah disebabkan oleh

karena secara struktural daerah memang miskin atau tidak memiliki sumber-sumber keuangan yang potensial, tetapi lebih banyak disebabkan oleh kebijakan Pemerintah Pusat. Selama ini sumber-sumber keuangan yang potensial dikuasai oleh Pemerintah Pusat (Rozali, 2000).

Peranan PAD yang relatif masih sangat kecil menyebabkan penerimaan pemerintah daerah baik secara langsung maupun tidak langsung sangat tergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Hal ini disebabkan oleh sumber-sumber yang masuk dalam kategori PAD umumnya bukan merupakan sumber yang potensial bagi daerah. Bilamana semakin besar dana yang digali oleh daerah yang diperlihatkan dengan proporsi PAD terhadap APBD, maka semakin besar pula kemampuan daerah untuk membangun daerahnya (Priandana, 2009).

2.3. Pengeluaran Pemerintah

2.3.1. Teori Pengeluaran Pemerintah

Mangkoesoebroto (2001) menggolongkan teori pengeluaran pemerintah dalam teori makroekonomi menjadi dua bagian, diantaranya oleh : **Rostow dan Musgrave**, di mana mereka menghubungkan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi. Menurut mereka, pada tahap awal perkembangan ekonomi, rasio pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional adalah relatif besar. Hal itu disebabkan karena pada tahap awal ini pemerintah harus menyediakan berbagai sarana dan prasarana bagi pembangunan. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan guna memacu pertumbuhan agar dapat lepas landas. Bersamaan dengan itu posisi investasi pihak swasta juga meningkat. Pada tahap ini peranan pemerintah adalah tetap besar karena terdapat banyak kegagalan pasar yang ditimbulkan perkembangan ekonomi itu sendiri, yaitu kasus eksternalitas negatif, misalnya pencemaran lingkungan.

Dalam proses pembangunan, Musgrave berpendapat bahwa rasio investasi total terhadap pendapatan nasional semakin besar, tetapi rasio investasi pemerintah terhadap pendapatan nasional akan semakin mengecil. Sementara itu Rostow berpendapat bahwa pada tahap lanjut pembangunan, terjadi peralihan aktivitas pemerintah dari penyediaan prasarana ekonomi ke pengeluaran-pengeluaran untuk layanan sosial seperti kesehatan dan pendidikan.

Hukum Wagner, berkaitan dengan pengamatan oleh Richard Musgrave bahwa aktivitas pemerintah dalam perekonomian cenderung semakin meningkat, sehingga Wagner mengukur perbandingan pengeluaran pemerintah terhadap produk nasional. Hasil

temuannya dinamakan hukum pengeluaran pemerintah yang selalu meningkat (*law of growing public expenditures*), dan dinamakan sebagai hukum aktivitas pemerintah yang selalu meningkat (*law of ever increasing state activity*).

Hukum tersebut dapat dirumuskan dengan notasi:

$$\begin{array}{ccccccc} G_{pct} & > & G_{pct-1} & > & G_{pct-2} & > & \dots > & G_{pct-n} \\ Y_{pct} & & Y_{pct-1} & & Y_{pct-2} & & & & Y_{pct-n} \end{array}$$

dimana:

G_{pc} = Pengeluaran pemerintah per kapita

Y_{pc} = Produk atau Pendapatan Nasional per kapita

t = Indeks waktu.

Menurut Wagner ada lima hal yang menyebabkan pengeluaran pemerintah selalu meningkat yaitu tuntutan peningkatan perlindungan keamanan dan pertahanan, kenaikan tingkat pendapatan masyarakat, urbanisasi yang mengiringi pertumbuhan ekonomi, perkembangan demokrasi dan ketidakefisienan birokrasi yang mengiringi perkembangan pemerintahan.

Pendapat lain yang menerangkan perilaku perkembangan pengeluaran pemerintah adalah disampaikan oleh **Peacock dan Wiseman**. Mereka mendasarkan pada suatu analisis "dialektika penerimaan-pengeluaran pemerintah." Pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan penerimaan dari pajak. Padahal masyarakat tidak menyukai pembayaran pajak yang kian besar. Mengacu pada teori pemungutan suara (voting), mereka berpendapat bahwa masyarakat mempunyai batas toleransi terhadap pajak yaitu suatu tingkat di mana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Tingkat toleransi pajak ini merupakan kendala yang membatasi pemerintah untuk menaikkan pungutan pajak secara tidak semena-mena atau sewenang-wenang.

Menurut Peacock-Wiseman, perkembangan ekonomi menyebabkan pungutan pajak meningkat yang meskipun tarif pajaknya mungkin tidak berubah namun pada akhirnya mengakibatkan pengeluaran pemerintah dapat meningkat juga. Jadi dalam keadaan normal, kenaikan pendapatan nasional juga dapat menaikkan baik penerimaan maupun pengeluaran pemerintah. Bilamana keadaan normal menjadi terganggu, katakanlah karena perang atau eksternalitas lain, maka pemerintah terpaksa harus memperbesar pengeluarannya untuk mengatasi gangguan dimaksud. Konsekuensinya, timbul tuntutan untuk memperoleh penerimaan pajak lebih besar.

Pungutan pajak yang lebih besar menyebabkan dana swasta untuk investasi dan modal kerja menjadi berkurang. Efek ini disebut efek penggantian (*displacement effect*). Postulat yang berkenaan dengan efek ini menyatakan, gangguan sosial dalam perekonomian menyebabkan aktivitas swasta digantikan oleh aktivitas pemerintah. Mengatasi gangguan acap kali tidak cukup dibiayai semata-mata dengan pajak sehingga pemerintah mungkin harus juga meminjam dana dari luar negeri. Setelah gangguan teratasi, muncul kewajiban melunasi utang dan membayar bunga, akibatnya pengeluaran pemerintah kian membengkak karena kewajiban baru tersebut.

Akibat lebih lanjut ialah pajak tidak turun kembali ke tingkat semula meskipun gangguan telah usai. Jika pada saat terjadinya gangguan sosial dan dalam perekonomian timbul efek penggantian, maka sesudah gangguan berakhir timbul pula sebuah efek lain yang disebut sebagai efek inspeksi (*inspection effect*). Postulat efek ini menyatakan, gangguan sosial menumbuhkan kesadaran masyarakat akan adanya hal-hal yang perlu ditangani oleh pemerintah sesudah redanya gangguan sosial tersebut. Kesadaran semacam ini menggugah kesediaan masyarakat untuk membayar pajak lebih besar, sehingga memungkinkan pemerintah beroleh penerimaan yang lebih besar pula. Inilah yang dimaksudkan dengan analisis dialektika penerimaan-pengeluaran pemerintah.

Suatu hal yang perlu dicatat dari Teori Peacock dan Wiseman adalah bahwa mereka mengemukakan adanya toleransi pajak, yaitu suatu limit perpajakan, akan tetapi mereka tidak menyatakan pada tingkat berapakah toleransi pajak tersebut. Clarke menyatakan bahwa limit perpajakan sebesar 25% dari pendapatan nasional. Apabila limit tersebut dilampaui maka akan terjadi inflasi dan gangguan sosial lainnya.

2.3.2. Klasifikasi Pengeluaran Pemerintah

Suparmoko (2002) menyatakan pengeluaran pemerintah dapat dinilai dari berbagai segi sehingga dapat dibedakan menjadi : (1) Pengeluaran itu merupakan investasi yang menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa-masa yang akan datang; (2) Pengeluaran itu langsung memberikan kesejahteraan dan kegembiraan bagi masyarakat; (3) Merupakan penghematan pengeluaran yang akan datang; dan (4) Menyediakan kesempatan kerja lebih banyak dan penyebaran tenaga beli yang lebih luas.

Berdasarkan atas penilaian di atas dapat dibedakan bermacam-macam pengeluaran negara meliputi : *Pertama*, Pengeluaran yang *self liquidating* sebagian atau seluruhnya, artinya pengeluaran pemerintah mendapatkan pembayaran kembali dari masyarakat yang

menerima jasa-jasa barang-barang yang bersangkutan. Misalnya pengeluaran untuk jasa-jasa perusahaan negara, atau untuk proyek-proyek produktif barang ekspor.

Kedua, Pengeluaran yang reproduktif, artinya mewujudkan keuntungan-keuntungan ekonomis bagi masyarakat, di mana dengan naiknya tingkat penghasilan dan sasaran pajak lainnya, akhirnya akan menaikkan penerimaan pemerintah. Misalnya pengeluaran untuk bidang pengairan, pertanian, pendidikan, kesehatan masyarakat (*public health*). *Ketiga*, Pengeluaran yang tidak *self liquidating* maupun yang tidak reproduktif, yaitu pengeluaran yang langsung menambah kegembiraan dan kesejahteraan masyarakat misalnya untuk bidang-bidang rekreasi, pendirian monumen, obyek-obyek *tourisme* dan sebagainya. Dan hal ini dapat juga mengakibatkan naiknya penghasilan nasional.

Keempat, Pengeluaran yang secara langsung tidak produktif dan merupakan pemborosan misalnya untuk pembiayaan pertahanan/perang meskipun pada saat pengeluaran terjadi penghasilan perorangan yang menerimanya akan naik. *Kelima*, Pengeluaran yang merupakan penghematan di masa yang akan datang misalnya pengeluaran untuk anak-anak yatim piatu. Kalau hal ini tidak dijalankan sekarang, kebutuhan-kebutuhan pemeliharaan bagi mereka di masa mendatang pada waktu usia yang lebih lanjut pasti akan lebih besar.

Maulida (2007) menyatakan, pengeluaran pemerintah dapat dibedakan menurut dua klasifikasi, yaitu: *Pertama*, Pengeluaran rutin yaitu pengeluaran untuk pemeliharaan atau penyelenggaraan roda pemerintahan sehari-hari meliputi : belanja pegawai, belanja barang, berbagai macam subsidi (subsidi daerah dan subsidi harga barang), angsuran dan bunga utang pemerintah, serta jumlah pengeluaran lain. Anggaran belanja rutin memegang peranan yang penting untuk menunjang kelancaran mekanisme sistem pemerintahan serta upaya peningkatan efisiensi dan produktivitas, yang pada gilirannya akan menunjang tercapainya sasaran dan tujuan setiap tahap pembangunan. Penghematan dan efisiensi pengeluaran rutin perlu dilakukan untuk menambah besarnya tabungan pemerintah yang diperlukan untuk pembiayaan pembangunan nasional. Penghematan dan efisiensi tersebut antara lain diupayakan melalui penajaman alokasi pengeluaran rutin, pengendalian dan koordinasi pelaksanaan pembelian barang dan jasa kebutuhan departemen/lembaga negara non departemen, dan pengurangan berbagai macam subsidi secara bertahap.

Kedua, Pengeluaran pembangunan yaitu pengeluaran yang bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk pembangunan baik prasarana fisik dan non fisik. Pengeluaran ini dibedakan atas pengeluaran pembangunan yang dibiayai dengan dana rupiah dan bantuan proyek. Pengeluaran pembangunan merupakan pengeluaran yang

ditujukan untuk membiayai program-program pembangunan sehingga anggarannya selalu disesuaikan dengan dana yang berhasil dimobilisasi. Dana ini kemudian dialokasikan pada berbagai bidang sesuai dengan prioritas yang telah direncanakan.

Sementara itu Santosa dan Rahayu (2005) menyatakan bahwa terdapat tiga pos utama pada sisi pengeluaran yaitu: (1) pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa, (2) pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawainya, dan (3) pengeluaran pemerintah untuk pembayaran transfer (transfer payments). Pembayaran transfer pemerintah adalah pembayaran pemerintah kepada individu yang tidak dipakai untuk menghasilkan barang dan jasa sebagai imbalannya, misalnya pengeluaran pemerintah berupa pembayaran subsidi atau bantuan langsung kepada berbagai golongan masyarakat.

2.4. Pengaruh PAD dan Pajak Daerah Terhadap Belanja Daerah

Studi tentang pengaruh pendapatan daerah (*local own resources revenue*) terhadap pengeluaran daerah sudah banyak dilakukan (misalnya Aziz et al, 2000; Blackley, 1986; Joulfaian & Mokeerjee, 1990; Legrenzi & Milas, 2001). Hipotesis yang menyatakan bahwa pendapatan daerah (terutama pajak) akan mempengaruhi anggaran belanja pemerintah daerah dikenal dengan nama *tax spend hypothesis*. Dalam hal ini pengeluaran pemerintah daerah akan disesuaikan dengan perubahan dalam penerimaan pemerintah daerah atau perubahan pendapatan terjadi sebelum perubahan pengeluaran.

Dalam konteks internasional, beberapa penelitian yang telah dilakukan untuk melihat pengaruh pendapatan daerah terhadap belanja (diantaranya adalah Cheng, 1999; Deller *et al*, 2002; Hoover & Sheffrin, 1992; Prakosa, 2004). Cheng (1999) menemukan bahwa hipotesis pajak-belanja berlaku untuk kasus Pemda di beberapa negara Amerika Latin, yakni Kolombia, Republik Dominika, Honduras, dan Paraguay. Deller *et al*, (2002) menyatakan bahwa kenaikan dalam pajak akan meningkatkan belanja daerah, sehingga akhirnya akan memperbesar defisit. Konsep yang sama dikemukakan oleh Hoover & Sheffrin (1992), yang secara empiris menemukan adanya perbedaan hubungan dalam dua rentang waktu yang berbeda. Mereka menemukan bahwa untuk sampel data sebelum pertengahan tahun 1960-an pajak berpengaruh terhadap belanja, sementara untuk sampel data sesudah tahun 1960-an pajak dan belanja tidak saling mempengaruhi (*causally independent*).

Secara empiris penelitian Prakosa (2004) membuktikan bahwa besarnya Belanja Daerah dipengaruhi oleh jumlah DAU yang diterima dari Pemerintah Pusat. Dari hasil penelitian tersebut, menunjukkan bahwa DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap

belanja daerah. Studi serupa oleh Riduansyah (2003) menyatakan total kontribusi komponen pajak daerah terhadap penerimaan APBD dalam kurun waktu tahun anggaran 1993/1994 – 2000 berkisar antara 7,07% – 8,79%, dengan rata-rata kontribusi per tahunnya sebesar 7,81% dengan pertumbuhan per tahun 22,89%. Kontribusi pajak terbesar terhadap total penerimaan APBD diberikan oleh pajak hotel dan restoran serta pajak hiburan. Pajak hotel dan restoran pada periode ini memberikan rata-rata kontribusi sebesar 3,06% per tahunnya dan tumbuh rata-rata sebesar 32,64% per tahun. Sedangkan pajak hiburan, pada kurun waktu yang sama memberikan rata-rata kontribusi sebesar 1,96% per tahun dan tumbuh rata-rata sebesar 8,58% per tahunnya.

2.5. Pengaruh Produk Domestik Bruto terhadap Pengeluaran Pemerintah

PDRB merupakan penjumlahan dari semua barang dan jasa akhir (semua nilai tambah yang dihasilkan oleh daerah dalam periode waktu tertentu (satu tahun). Untuk menghitung nilai seluruh produksi yang dihasilkan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu dapat digunakan 3 cara perhitungan. Tiga cara perhitungan tersebut adalah sebagai berikut (Mankiw, 2012):

1. Cara Produksi

Nilai seluruh produksi diperoleh dari menjumlahkan nilai-nilai hash' produksi yang dihasilkan oleh berbagai industri yang ada dalam perekonomian. Hasil perhitungannya disebut PDRB. Unit-unit produksi tersebut sebelum tahun 1993 dikelompokkan dalam 11 lapangan usaha, sesudah tahun 1993 dikelompokkan menjadi 9 lapangan usaha, yaitu: pertanian; pertambangan dan galian; industri pengolahan; listrik gas dan air bersih; bangunan/konstruksi; perdagangan; rumah makan dan jasa akomodasi; angkutan dan komunikasi; lembaga keuangan; sewa bangunan dan jasa perusahaan; jasa-jasa.

2. Cara pengeluaran.

Nilai seluruh produksi diperoleh dari penjumlahan pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan rumah-rumah tangga dan perusahaan-perusahaan, pemerintah dan luar negeri atas produk barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu daerah, seperti:

- a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta
- b. Konsumen pemerintah
- c. Pembentukan Modal Tetap Bruto
- d. Perubahan stok
- e. Ekspor neto.

3. Cara pendapatan

Nilai seluruh produksi dalam perekonomian diperoleh dengan menjumlahkan pendapatan seluruh factor produksi yang digunakan dalam produksi, yaitu pendapatan dari sumber alam, tenaga kerja, modal yang ditawarkan dan keahlian kepemimpinan. Hubungan antara PAD dengan PDRB merupakan hubungan secara fungsional, karena PDRB merupakan fungsidari PAD. Dengan meningkatnya PDRB maka akan menambah penerimaan pemerintah daerah untuk membiayai program-program pembangunan. Selanjutnya akan mendorong peningkatan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat yang diharapkan akan dapat meningkatkan produktivitasnya.

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Jawa Tengah dengan pertimbangan daerah ini merupakan salah satu daerah potensial ekonomi yang makin bertumbuh dengan potensi pajak yang besar. Penelitian ini berlangsung selama dua tahun selama tahun 2013 dan 2014.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Data yang diperlukan untuk kebutuhan analisis dalam penelitian ini mencakup data sekunder. Data sekunder berbentuk data periode tahunan (*time series data*) dari tahun 1980 hingga 2011 (32 tahun). Data bersumber pada Badan Pusat Statistik Nasional dan Daerah, Bank Indonesia Pusat dan Wilayah, dan Instansi/Dinas terkait lainnya.

3.3. Model

Model ekonometrika yang dibangun dan diestimasi dalam penelitian ini dibangun berdasarkan konsep fungsi pajak dan aplikasinya pada ekonomi dan pembangunan daerah. Model diartikan sebagai sebuah abstraksi atau representasi dari sebuah fenomena aktual dan realisasi dari dunia nyata. Model yang dibangun dan menjelaskan tentang realisasi fungsi pajak dan efeknya terhadap perekonomian daerah.

Model dirumuskan sebagai berikut : (1) Fungsi *budgetair* pajak dispesifikasi dalam persamaan rencana anggaran pemerintah dan pengeluaran pemerintah daerah, (2) Fungsi *regulered* pajak dispesifikasi dalam persamaan terciptanya penanaman investasi asing (PMA), penanaman investasi Dalam Negeri (PMDN), dan total investasi daerah, (3) Fungsi *stabilisasi* pajak dispesifikasi dalam persamaan jumlah uang beredar dan pengendalian tingkat inflasi, (4) Fungsi *distribusi* pajak dispesifikasi dalam persamaan penciptaan lapangan kerja atau kegiatan ekonomi masyarakat yang ditunjukkan oleh jumlah unit usaha yang tercipta di daerah dan penyerapan tenaga kerja, dan (5) pengaruh pajak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dispesifikasikan dalam persamaan Produk Domestik Regional Bruto. Masing-masing persamaan dibangun dalam hubungan interdependensi satu sama lain sebagai suatu kesatuan fungsi.

3.3.1. Spesifikasi atau Perumusan Model

Spesifikasi model penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Jawa Tengah sebagai sistem persamaan ekonometrika ditulis sebagai berikut :

$$\text{TAX} = \sum_{i=1}^n (\text{TX1} + \text{TX2} + \text{TX3} + \dots + \text{TXn}) \dots\dots\dots (1)$$

$$\text{REVGGOV} = a_0 + a_1 \text{TAX} + a_2 \text{DIMB} + a_3 \text{RETR} + a_4 \text{LBUMD} + a_5 \text{PDRB} + u_1 \dots\dots\dots (2)$$

$$\text{EGOV} = b_0 + b_1 \text{REVGGOV} + b_2 \text{INVG} + b_3 \text{ERUT} + u_2 \dots\dots\dots (3)$$

$$\text{PMDN} = c_0 + c_1 \text{IR} + c_2 \text{DAU} + c_3 \text{DAK} + c_4 \text{DIMB} + c_5 \text{EGOV} + c_6 \text{EX} + u_3 \dots\dots\dots (4)$$

$$\text{PMA} = d_0 + d_1 \text{IR} + d_2 \text{ER} + d_3 \text{EGOV} + d_4 \text{EX} + d_5 \text{IM} + u_4 \dots\dots\dots (5)$$

$$\text{INVD} = \text{PMDN} + \text{PMA} \dots\dots\dots (6)$$

$$\text{MS} = e_0 + e_1 \text{IR} + e_2 \text{INVD} + e_3 \text{EGOV} + u_5 \dots\dots\dots (7)$$

$$\text{INF} = f_0 + f_1 \text{IHK} + f_2 \text{MS} + u_6 \dots\dots\dots (8)$$

$$\text{USHA} = g_0 + g_1 \text{EGOV} + g_2 \text{INVD} + g_3 \text{MS} + g_4 \text{PDRB} + u_7 \dots\dots\dots (9)$$

$$\text{TK} = h_0 + h_1 \text{UMR} + h_2 \text{USHA} + h_3 \text{INVD} + h_4 \text{INVG} + h_5 \text{POP} + u_8 \dots\dots\dots (10)$$

$$\text{PDRB} = i_0 + i_1 \text{INVD} + i_2 \text{TK} + i_3 \text{EX} + i_4 \text{EGOV} + i_5 \text{USHA} + u_9 \dots\dots\dots (11)$$

Tanda parameter dugaan yang diharapkan (hipotesis) pada persamaan-persamaan di atas adalah $a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, b_1, b_2, b_3, c_2, c_3, c_4, c_5, c_6, d_1, d_2, d_3, d_4, d_5, e_2, e_3, f_1, f_2, g_1, g_2, g_3, g_4, h_2, h_3, h_4, h_5, i_1, i_2, i_3, i_4, i_5 > 0$; dan $c_1, e_1, h_1 < 0$.

Keterangan :

- REVGGOV = Rencana anggaran pemerintah (Rp)
- TAX = Penerimaan pajak daerah (Rp)
- TX_{1...n} = Jenis-jenis pajak daerah (Rp)
- DIMB = Dana perimbangan daerah (Rp)
- RETR = Retribusi daerah (Rp)
- LBUMD = Laba BUMD (Rp)
- EGOV = Pengeluaran pemerintah (Rp)
- INVG = Pengeluaran investasi pemerintah (Rp)
- ERUT = Pengeluaran rutin pemerintah (Rp)
- PMDN = Penanaman Modal Dalam Negeri (Rp)
- IR = Suku bunga (%)
- DAU = Dana Alokasi Umum (Rp)
- DAK = Dana Alokasi Khusus (Rp)
- EX = Nilai ekspor (Rp)
- PMA = Penanaman Modal Asing (Rp)
- ER = Nilai tukar (Rp/\$)
- IM = Nilai impor (Rp)
- INVD = Total investasi daerah (Rp)
- MS = Jumlah uang beredar (Rp)
- INF = Inflasi (%)
- IHK = Indeks Harga Konsumen (indeks)
- USHA = Jumlah unit usaha (unit)
- TK = Jumlah penyerapan tenaga kerja (orang)
- UMR = Upah Minimum Regional (Rp)

POP = Jumlah populasi (orang)
 PDRB = Produk Domestik Regional Bruto (Rp).

3.3.2. Identifikasi dan Metode Estimasi Model

Sebelum diestimasi, terlebih dahulu model diidentifikasi untuk mengetahui apakah parameter-parameternya dapat diduga. Pengujian indentifikasi menggunakan dalil *order condition* (Koutsoyianis, 2000). *Order condition* diekspresikan sebagai berikut :

$$(K - M) \geq (G - 1) \dots\dots\dots (12)$$

dimana :

G = Jumlah peubah endogen dalam model
 K = Total peubah dalam model (peubah endogen dan eksogen)
 M = Jumlah peubah endogen dan eksogen yang dimasukan dalam suatu persamaan.

Jika : $(K - M) = (G - 1)$ maka suatu persamaan dikatakan *exactly identified*,

$(K - M) > (G - 1)$ persamaan dikatakan *overidentified*, dan

$(K - M) < (G - 1)$ persamaan dikatakan *underidentified*.

Model yang dirumuskan memiliki 10 persamaan terdiri dari 9 persamaan struktural dan 1 persamaan identitas. Jumlah peubah endogen sebanyak 10 dan peubah eksogen sebanyak 15. Setelah model diidentifikasi dengan menggunakan *order condition*, diperoleh seluruh persamaan adalah “*overidentified*” sehingga metode estimasi yang dapat diterapkan adalah metode 2 SLS (*Two Stage Least Squares*). Uji statistik F dan t digunakan untuk menguji apakah peubah-peubah penjelas secara bersama-sama atau masing-masing berpengaruh nyata atau tidak terhadap peubah endogen.

3.3.3. Validasi Model

Untuk tujuan analisis simulasi, terlebih dahulu model divalidasi untuk mengetahui apakah model sudah cukup baik atau belum. Kriteria statistik yang digunakan untuk validasi adalah *Root Mean Squares Error* (RMSE), *Root Mean Squares Percent Error* (RMSPE) dan *U-Theil* (*Theil's Inequality Coefficient*). Penggunaan kriteria statistik bertujuan untuk membandingkan nilai aktual dengan nilai dugaan peubah endogen. Semakin kecil nilai RMSE, RMSPE dan U semakin baik modelnya. Kriteria-kriteria statistik di atas dirumuskan sebagai berikut :

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{t=1}^n (Y_t^s - Y_t^a)^2} \dots\dots\dots (13)$$

$$\text{RMSPE} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{t=1}^n \left(\frac{Y_t^s - Y_t^a}{Y_t^a} \right)^2} \dots\dots\dots (14)$$

$$U = \frac{\sqrt{\frac{1}{n} \sum_{t=1}^n (Y_t^s - Y_t^a)^2}}{\sqrt{\frac{1}{n} \sum_{t=1}^n (Y_t^s)^2 + \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n (Y_t^a)^2}} \dots\dots\dots (15)$$

dimana:

Y_t^s = Nilai hasil simulasi dasar dari variabel observasi

Y_t^a = Nilai aktual variabel observasi.

n = Jumlah periode observasi.

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Perkembangan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah

4.1.1. Penerimaan Pajak Daerah

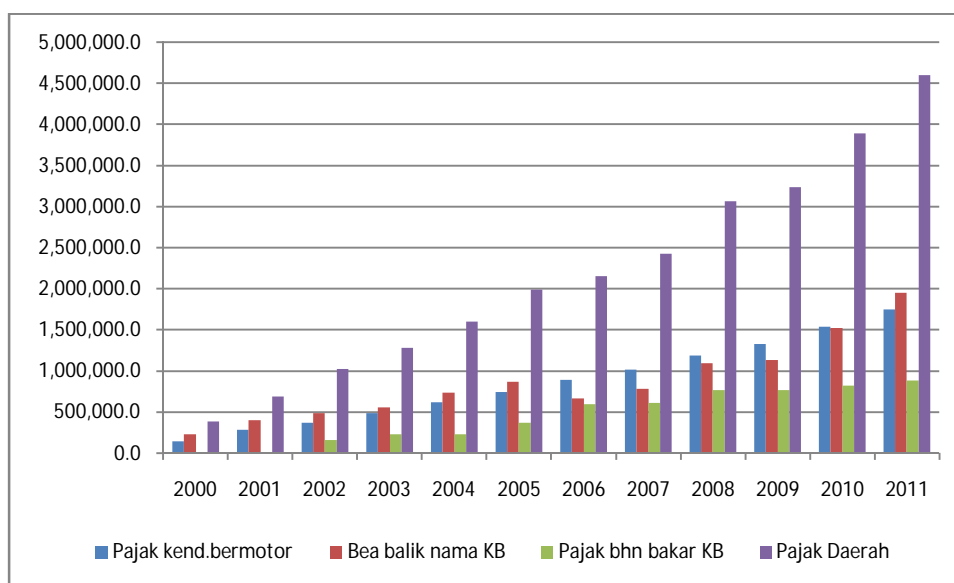
Pajak daerah provinsi Jawa Tengah sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 mencakup pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak/bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), pajak air permukaan, dan pajak rokok. Dari jenis ini, nilai pajak yang tersedia dan dilaporkan secara periodik di Provinsi Jawa Tengah adalah PKB, BBNKB, dan PBBKB. Jenis pajak daerah lainnya tidak tersedia data. Perkembangan penerimaan pajak daerah dan ketiga jenis pajak tersebut disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Tengah, Tahun 1980 - 2011

No	Tahun	Pajak Daerah (Jt Rp)	Pajak Kendaraan Bermotor (Jt Rp)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Jt Rp)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Jt Rp)
1	1980	19,668.2	7,289.2	12,181.2	197.9
2	1981	23,035.6	7,907.7	14,855.9	272.0
3	1982	24,405.6	8,774.5	15,251.4	379.7
4	1983	26,068.6	11,051.7	14,371.9	645.0
5	1984	29,427.4	13,587.1	15,037.9	802.4
6	1985	35,421.0	17,248.3	17,358.1	814.7
7	1986	40,892.9	20,712.1	20,041.8	138.9
8	1987	46,712.3	22,680.6	23,988.7	43.0
9	1988	52,304.4	24,818.1	26,689.0	797.3
10	1989	69,188.4	26,808.4	35,610.4	6,769.6
11	1990	81,635.0	29,722.1	49,745.6	2,167.3
12	1991	87,942.1	33,270.0	52,127.7	2,544.4
13	1992	92,939.7	45,499.2	44,986.1	2,454.3
14	1993	118,195.7	50,912.6	64,644.9	2,638.2
15	1994	170,703.7	63,055.7	104,632.1	3,015.9
16	1995	229,838.7	89,842.8	135,503.8	4,492.1
17	1996	269,177.2	103,251.7	160,300.0	5,625.5
18	1997	294,956.0	117,001.0	172,251.8	5,703.1
19	1998	187,763.4	118,176.6	61,853.7	7,733.0
20	1999	269,804.3	146,298.7	116,956.9	6,548.7
21	2000	392,164.8	151,705.7	232,977.6	7,481.5
22	2001	695,365.7	285,522.3	401,618.8	8,224.5
23	2002	1,024,176.9	370,995.1	491,535.7	161,646.1
24	2003	1,281,489.7	489,619.2	561,460.3	230,410.2
25	2004	1,602,699.4	626,757.8	743,088.9	232,852.6
26	2005	1,995,498.2	750,314.6	873,710.0	371,473.6
27	2006	2,160,427.4	894,478.1	670,002.3	595,947.0
28	2007	2,426,080.1	1,021,411.3	786,258.9	618,409.9
29	2008	3,068,130.1	1,194,793.8	1,100,697.1	772,639.2
30	2009	3,236,779.0	1,333,386.4	1,136,036.7	767,355.9
31	2010	3,893,700.0	1,544,313.6	1,525,124.5	824,261.9
32	2011	4,599,047.0	1,755,017.9	1,957,340.1	886,689.0
Rata – rata per tahun		892,051.2	355,507.0	363,695.0	172,849.2
(%)		(100.0)	(39.85)	(40.77)	(19.40)

Sumber : Data lapangan, 2013

Gambar 1. Trend Realisasi Penerimaan Pajak Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Tengah, 12 Tahun Terakhir (2000 – 2011) (dalam juta rupiah)



Berdasarkan data pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa penerimaan komponen masing-masing pajak yaitu (1) pajak kendaraan bermotor, (2) bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor masing-masing mengalami peningkatan yang tajam dari tahun ke tahun selama kurun waktu 1980 hingga 2011. Begitu juga total penerimaan pajak daerah mengalami peningkatan yang cukup cepat. Kontribusi dari masing-masing jenis pajak terhadap total pajak daerah adalah rata-rata sebesar 39,85% untuk pajak kendaraan bermotor, 40,77% untuk pajak balik nama kendaraan bermotor, dan 19.40 % untuk pajak bahan bakar kendaraan bermotor.

4.1.2. Pendapatan dan Pengeluaran Pemerintah Daerah

Pendapatan pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah bersumber dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dan laba perusahaan milik daerah, serta penerimaan lainnya yang sah bagi pemerintah daerah. Sedangkan pengeluaran pemerintah daerah terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Perkembangan pendapatan dan pengeluaran pemerintah daerah Jawa Tengah disajikan pada Tabel 2 berikut.

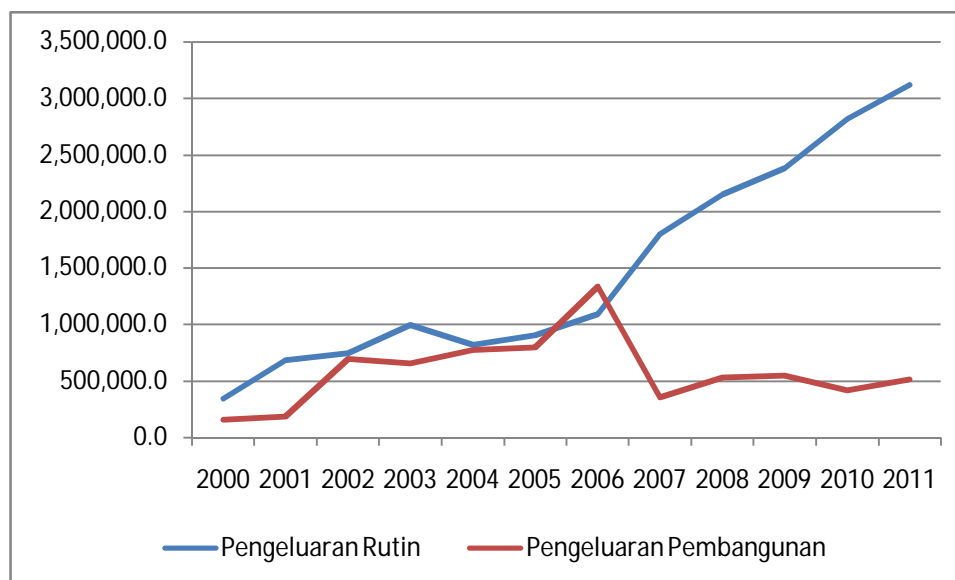
Tabel 2. Perkembangan Pendapatan dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, Tahun 1980 – 2011

No	Tahun	Pendapatan Pemerintah (Jt Rp)	Pengeluaran Pemerintah (Jt Rp)
1	1980	208,929.0	183,037.0
2	1981	257,602.0	242,850.0
3	1982	279,738.0	269,228.0
4	1983	311,831.0	296,037.0
5	1984	354,744.0	336,865.0
6	1985	391,396.0	376,176.0
7	1986	412,138.0	395,442.0
8	1987	332,720.0	299,158.0
9	1988	470,356.0	456,899.0
10	1989	534,192.0	516,281.0
11	1990	605,890.0	575,853.0
12	1991	654,090.5	626,666.5
13	1992	702,291.0	677,480.0
14	1993	834,218.0	810,177.0
15	1994	1,138,624.0	1,092,608.0
16	1995	1,324,981.0	1,260,540.0
17	1996	1,500,398.0	1,460,140.0
18	1997	1,452,105.0	1,420,371.0
19	1998	684,693.0	587,720.0
20	1999	946,238.0	796,491.0
21	2000	1,081,631.0	857,279.0
22	2001	1,934,153.0	1,508,025.0
23	2002	2,389,762.0	2,133,153.0
24	2003	2,452,412.6	2,352,853.7
25	2004	2,883,599.9	2,572,554.4
26	2005	3,526,839.4	2,936,310.8
27	2006	3,745,189.6	4,001,820.0
28	2007	4,367,206.2	3,016,826.6
29	2008	5,203,414.6	5,162,662.1
30	2009	5,696,660.1	5,200,113.1
31	2010	6,229,527.2	4,852,025.6
32	2011	7,038,908.7	5,846,515.4

Sumber : Data lapangan, 2013

Secara umum data pada Tabel 2 menunjukkan bahwa baik pendapatan maupun pengeluaran pemerintah daerah Jawa Tengah terus mengalami peningkatan sejak tahun 1980. Peningkatan tersebut disebabkan karena sumber penerimaan mengalami peningkatan yang kemudian diikuti oleh pengeluaran baik untuk pembiayaan rutin kegiatan pemerintah maupun pengeluaran pembangunan. Perkembangan pengeluaran rutin pemerintah daerah maupun pengeluaran pembangunan 12 tahun terakhir dapat diikuti pada Gambar 2 berikut.

Gambar 2. Trend Alokasi Anggaran untuk Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, 12 Tahun Terakhir (2000 – 2011) (dalam juta rupiah).



Perkembangan komponen pengeluaran pemerintah daerah Jawa Tengah pada Gambar 2 menunjukkan, pada tahun 2000 hingga 2005 alokasi anggaran untuk pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan relatif berimbang. Bahkan pada tahun 2006, alokasi anggaran untuk pengeluaran pembangunan adalah lebih tinggi dibanding pengeluaran rutin. Ini menunjukkan bahwa fokus pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan daerah sangatlah besar.

Perkembangan selanjutnya tahun 2007 hingga 2011 menunjukkan, alokasi anggaran untuk pembangunan berkurang drastis, sementara alokasi anggaran untuk pengeluaran rutin meningkat dengan cepat. Keadaan ini mengindikasikan pemerintah daerah lebih cenderung mengurangi perannya dalam mendorong pembangunan dan pertumbuhan daerah, melainkan lebih fokus dalam membenahan administrasi pemerintahan daerah.

4.1.3. Pertumbuhan Investasi Daerah

Perkembangan investasi di daerah Provinsi Jawa Tengah mencakup jumlah penanaman investasi oleh perusahaan Asing dan penanaman investasi yang dilakukan perusahaan Dalam Negeri. Data pada Tabel 3 menyajikan perkembangan investasi oleh perusahaan Asing dan perusahaan Dalam Negeri serta total investasi di Provinsi Jawa Tengah.

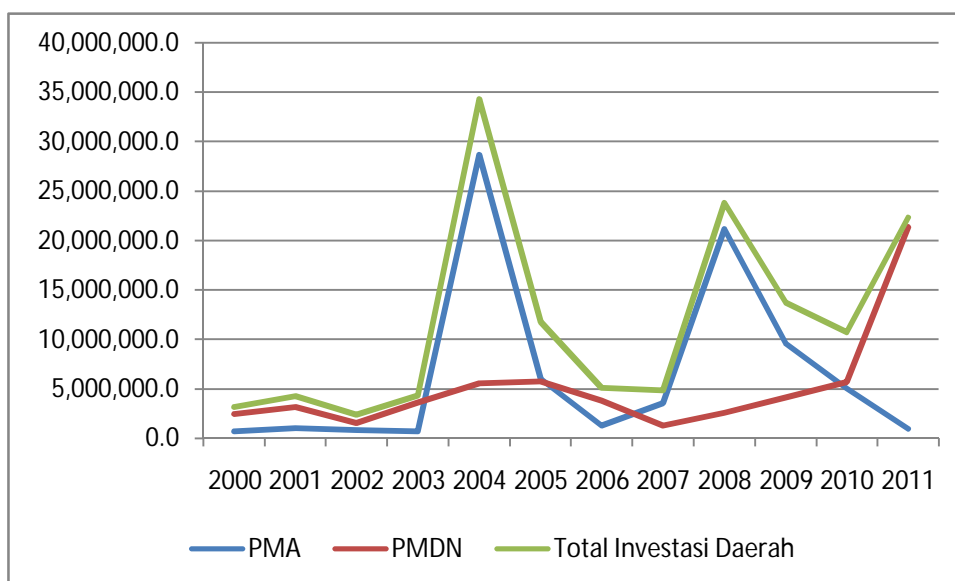
Tabel 3. Perkembangan Investasi Langsung Asing dan Investasi Dalam Negeri di Provinsi Jawa Tengah, Tahun 1980 – 2011

No	Tahun	Penanaman Modal Asing (Jt Rp)	Penanaman Modal Dalam Negeri (Jt Rp)	Total Investasi Daerah Jawa Tengah (Jt Rp)
1	1980	113,223.1	165,028.7	278,251.8
2	1981	121,039.2	193,292.3	314,331.5
3	1982	128,761.5	433,156.3	561,917.7
4	1983	185,487.5	1,727,806.2	1,913,293.7
5	1984	209,359.6	1,898,570.7	2,107,930.3
6	1985	279,865.7	612,204.7	892,070.4
7	1986	437,699.6	704,678.4	1,142,378.0
8	1987	489,949.8	848,629.9	1,338,579.7
9	1988	625,938.5	1,076,869.8	1,702,808.3
10	1989	2,720,534.1	796,500.0	3,517,034.1
11	1990	198,032.9	5,799,280.9	5,997,313.8
12	1991	492,287.2	695,397.3	1,187,684.5
13	1992	182,038.8	1,370,565.7	1,552,604.6
14	1993	206,648.1	2,989,099.8	3,195,747.9
15	1994	4,068,335.0	6,819,769.2	10,888,104.2
16	1995	1,709,944.6	4,667,753.5	6,377,698.1
17	1996	8,610,428.2	4,508,583.0	13,119,011.2
18	1997	10,330,100.1	7,406,630.8	17,736,730.9
19	1998	24,654,399.1	2,482,396.4	27,136,795.5
20	1999	908,201.0	1,038,689.1	1,946,890.1
21	2000	691,535.0	2,451,203.4	3,142,738.4
22	2001	1,005,492.7	3,211,219.0	4,216,711.7
23	2002	820,379.1	1,541,259.6	2,361,638.7
24	2003	677,355.5	3,607,653.6	4,285,009.1
25	2004	28,677,003.3	5,608,617.4	34,285,620.7
26	2005	6,000,546.6	5,756,775.9	11,757,322.4
27	2006	1,284,347.2	3,821,468.6	5,105,815.7
28	2007	3,524,905.3	1,306,994.5	4,831,899.9
29	2008	21,186,210.9	2,578,988.5	23,765,199.4
30	2009	9,578,923.5	4,128,785.2	13,707,708.7
31	2010	5,045,252.4	5,678,581.8	10,723,834.2
32	2011	936,316.9	21,374,410.6	22,310,727.5

Sumber : Data lapangan, 2013

Data Tabel 3 menunjukkan bahwa baik investasi Asing maupun investasi Dalam Negeri mengalami fluktuasi cukup besar selama tahun 1980 hingga 2011. Perkembangan ini menunjukkan pertumbuhan investasi di daerah Jawa Tengah dari tahun ke tahun tidak selamanya terus meningkat. Dari data yang ada terlihat sangat sering investasi pada tahun-tahun tertentu meningkat tajam tetapi pada tahun-tahun berikutnya mengalami penurunan tajam yang kemudian kembali meningkat pada waktu berikutnya. Fluktuasi investasi akan berdampak pada perkembangan baik produksi wilayah atau Produk Domestik Regional Bruto, penyerapan tenaga kerja, maupun produksi ekspor wilayah. Trend investasi Asing dan investasi Dalam Negeri selama 12 tahun terakhir di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Trend Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, dan Total Investasi Daerah Provinsi Jawa Tengah, 12 Tahun Terakhir (2000 – 2011) (dalam juta rupiah).



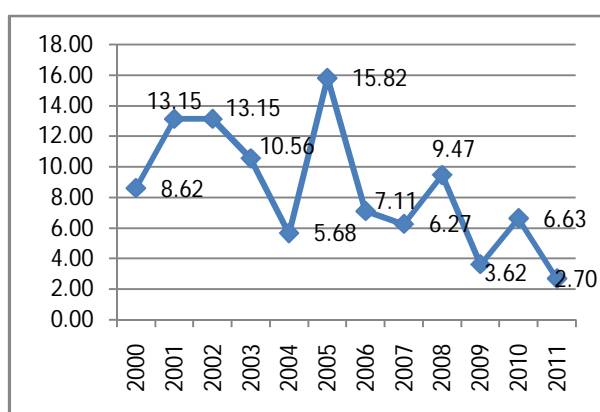
Gambar 3 menunjukkan penanaman modal Asing selama tahun 2000 hingga 2003 relatif stabil, namun meningkat tajam pada tahun 2004 dan menurun drastis hingga tahun 2006, kemudian naik tajam pada tahun 2008 dan menurun drastis hingga tahun 2011. Perkembangan penanaman modal Dalam Negeri relatif kecil berfluktuasi tahun 2000 hingga 2007, dan menunjukkan peningkatan cukup tajam tahun 2008 hingga tahun 2011. Jika dicermati perkembangan kedua investasi ini, pada beberapa tahun terakhir yakni tahun 2010 hingga 2011, pertumbuhan investasi di Jawa Tengah lebih didominasi oleh investasi Dalam Negeri. Ini berarti pemerintah daerah lebih memberikan ruang bagi pertumbuhan investasi oleh pengusaha Dalam Negeri.

4.1.4. Inflasi dan Uang Beredar

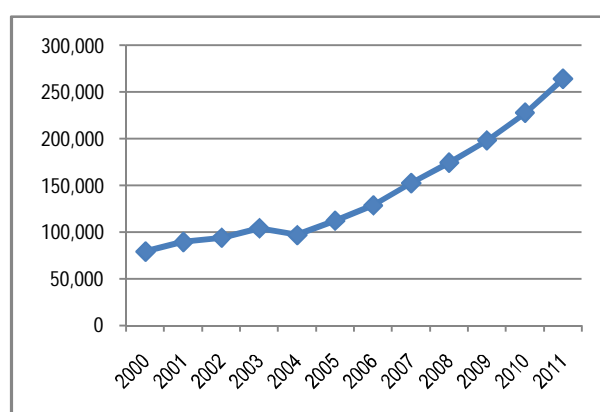
Perkembangan jumlah uang beredar (*money supply*) dalam suatu perekonomian akan mendorong pertumbuhan produksi dalam perekonomian tersebut, tetapi akibat peningkatan jumlah uang beredar dapat mempengaruhi kenaikan harga-harga dalam perekonomian (inflasi). Data pada Tabel 4 dan Gambar 4 memperlihatkan perkembangan inflasi dan jumlah uang beredar di provinsi Jawa Tengah.

Tabel 4. Perkembangan Inflasi dan Jumlah Uang Beredar di Provinsi Jawa Tengah, Tahun 1980 – 2011

No	Tahun	Laju Inflasi (%)	Jumlah Uang Beredar (Jt Rp)
1	1980	12.27	3,640,869
2	1981	12.86	4,386,327
3	1982	13.45	4,639,707
4	1983	13.16	5,060,333
5	1984	6.83	5,510,590
6	1985	6.88	6,403,841
7	1986	10.71	6,678,244
8	1987	14.69	7,111,750
9	1988	3.88	7,646,943
10	1989	7.12	9,058,037
11	1990	8.27	10,032,981
12	1991	10.49	11,478,498
13	1992	7.02	13,164,508
14	1993	10.01	15,455,067
15	1994	9.36	18,424,903
16	1995	8.27	23,384,833
17	1996	5.89	30,081,544
18	1997	9.61	42,705,928
19	1998	70.56	69,086,720
20	1999	1.02	69,132,928
21	2000	8.62	79,163,090
22	2001	13.15	89,353,939
23	2002	13.15	93,925,949
24	2003	10.56	104,057,301
25	2004	5.68	96,693,015
26	2005	15.82	112,120,656
27	2006	7.11	128,672,047
28	2007	6.27	152,452,300
29	2008	9.47	174,279,908
30	2009	3.62	198,103,925
31	2010	6.63	227,795,564
32	2011	2.70	264,015,338



(a) Trend Inflasi



(b) Trend Jumlah Uang Beredar

Gambar 4. Trend Inflasi dan Jumlah Uang Beredar di Provinsi Jawa Tengah, 12 Tahun Terakhir (2000 – 2011)

Perkembangan data laju inflasi pada Tabel 4 menunjukkan selama tahun 1980 hingga 2011, inflasi mengalami fluktuasi yang teratur yakni meningkat dan kemudian menurun dengan pola yang tetap per periode tahunan. Namun jika dicermati, secara umum dapat dikatakan laju inflasi menunjukkan kecenderungan menurun dari tahun 1980 hingga 2012. Sebaliknya jumlah uang beredar juga mengalami fluktuasi kecil dari tahun ke tahun, namun secara keseluruhan menunjukkan peningkatan yang cepat. Diketahui bahwa kegiatan dalam perekonomian wilayah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan karena itu akan disertai dengan penawaran jumlah uang beredar dalam perekonomian.

Jika dilihat trend inflasi pada Gambar 4 (a) maka diketahui laju inflasi tahunan mengalami fluktuasi cukup besar dari tahun 2000 hingga 2011, namun dengan kecenderungan yang makin menurun. Penurunan laju inflasi menunjukkan kondisi perekonomian Jawa Tengah semakin membaik yang ditandai dengan kecenderungan harga-harga mengalami penurunan. Sebaliknya Gambar 4 (b) menunjukkan trend jumlah uang beredar relatif mengalami peningkatan kecil dari tahun 2000 hingga 2004, namun terus menunjukkan peningkatan yang tajam dari tahun 2005 hingga 2011. Jika dilihat dari peran uang sebagai penggerak ekonomi masyarakat, maka peningkatan tajam jumlah uang beredar dari tahun 2005 hingga 2011 akan mengakibatkan produksi perekonomian akan meningkat dengan mantab.

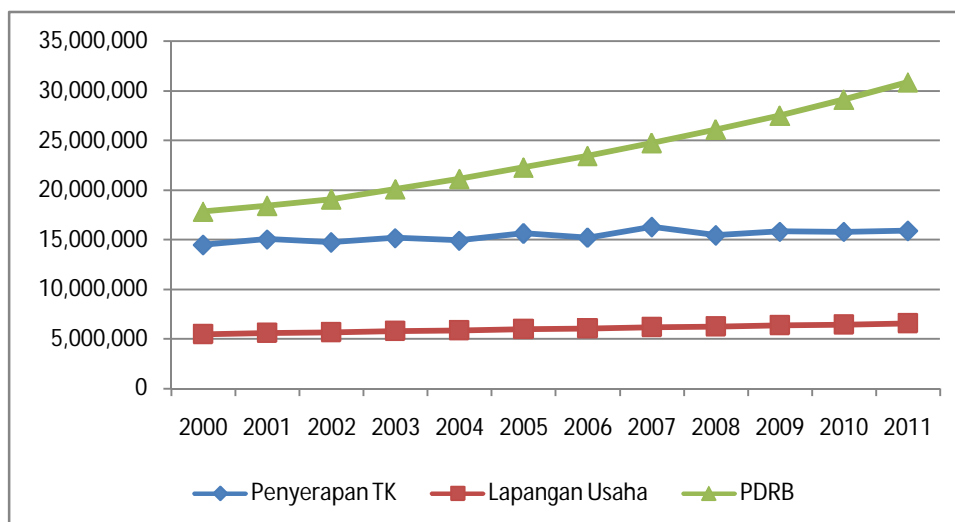
4.1.5. Penyerapan Tenaga Kerja, Jumlah Kegiatan Ekonomi, dan Produksi

Indikasi bahwa perekonomian mengalami pertumbuhan dilihat dari seberapa besar terjadi pertumbuhan penyerapan tenaga kerja dalam perekonomian, pertumbuhan lapangan kerja/usaha, dan pertumbuhan produksi yang diindikasikan oleh pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto. Data pada Tabel 5 menyajikan jumlah penyerapan tenaga kerja, penciptaan lapangan usaha, dan nilai Produk Domestik Regional Bruto. Lebih spesifik akan dilihat kondisi perkembangan ketiga faktor di atas dalam kurun waktu 12 tahun terakhir, yang mana disajikan dalam Gambar 5.

Tabel 5. Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja, Lapangan Usaha, dan Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Jawa Tengah, Tahun 1980 – 2011

No	Tahun	Penyerapan Tenaga Kerja (org)	Lapangan Usaha (unit)	PDRB Menurut Harga Konstan 1983 (Jt Rp)
1	1980	9,966,183	5,015,320	5,215,651.5
2	1981	10,098,732	5,118,176	6,186,518.5
3	1982	10,265,546	5,221,032	6,459,109.4
4	1983	10,581,660	5,323,888	6,967,011.2
5	1984	10,752,202	5,426,745	7,514,873.9
6	1985	11,137,993	5,529,601	8,135,020.4
7	1986	11,598,186	5,632,457	8,604,739.0
8	1987	11,972,119	5,735,313	9,031,907.7
9	1988	12,066,729	5,838,170	9,685,894.6
10	1989	12,174,330	5,889,598	11,340,444.9
11	1990	12,375,107	5,941,026	12,134,025.4
12	1991	13,544,104	6,043,882	13,032,567.7
13	1992	14,022,669	6,146,738	13,931,110.1
14	1993	14,047,137	6,249,595	14,829,652.5
15	1994	13,850,929	6,352,451	15,862,378.2
16	1995	14,062,056	6,403,879	17,027,131.6
17	1996	13,841,255	6,455,307	18,270,213.7
18	1997	13,805,930	6,306,735	18,823,456.6
19	1998	14,117,828	5,306,735	16,613,092.9
20	1999	14,566,119	5,406,735	17,193,222.6
21	2000	14,491,222	5,506,735	17,868,457.5
22	2001	15,066,542	5,606,735	18,463,543.4
23	2002	14,751,088	5,706,735	19,105,331.2
24	2003	15,196,265	5,806,735	20,121,876.1
25	2004	14,930,097	5,906,735	21,153,687.5
26	2005	15,655,303	6,006,735	22,284,877.6
27	2006	15,210,931	6,106,735	23,473,722.6
28	2007	16,304,058	6,206,735	24,786,595.2
29	2008	15,463,658	6,306,735	26,138,805.5
30	2009	15,835,382	6,406,735	27,522,635.0
31	2010	15,809,447	6,506,735	29,130,625.9
32	2011	15,916,135	6,606,735	30,880,198.9

Gambar 5. Trend Penyerapan Tenaga Kerja, Lapangan Usaha, dan PDRB Provinsi Jawa Tengah, 12 Tahun Terakhir (2000 – 2011)



Perkembangan penyerapan tenaga kerja, lapangan usaha, dan Produk Domestik Regional Bruto yang disajikan pada Tabel 5 di atas menunjukkan peningkatan yang relatif stabil selama kurun waktu tahun 1980 hingga 2011. Peningkatan ini mengindikasikan kegiatan perekonomian dari sisi produksi terus membaik yang artinya fundamen perekonomian makin kuat. Jika dilihat pada Gambar 5, selama 12 tahun terakhir dari 2000 hingga 2011 lapangan usaha di provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan kecil yang relatif stabil yang diikuti dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja yang juga stabil. Kondisi pertumbuhan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja ini memberikan pengaruh yang cukup baik terhadap pertumbuhan nilai Produk Domestik Regional Bruto yang mana mengalami peningkatan cukup tinggi dengan pola yang mantab. Keadaan ini dapat dikatakan menciptakan kondisi perekonomian Provinsi Jawa Tengah yang makin bertumbuh dan berkembang.

4.2. Pendugaan Model Fungsi Pajak

Fungsi pajak sebagai *budgetair*, *regulated*, stabilisasi, distribusi, dan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Daerah Jawa Tengah dimodel dalam sebuah model ekonometrika. Sesuai pengertiannya, masing-masing fungsi pajak dibentuk dalam beberapa persamaan ekonometrika kemudian diestimasi untuk menjelaskan kapasitas dari setiap peubah pengaruh yang menunjukkan seberapa kuat fungsi pajak. Simulasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pertumbuhan yang terjadi pada setiap fungsi pajak sebagai akibat peningkatan jenis-jenis pajak daerah.

Fungsi *budgetair* pajak dibentuk dalam persamaan rencana anggaran pemerintah dan pengeluaran pemerintah daerah, fungsi *regulated* dibentuk dalam persamaan penanaman investasi asing (PMA), penanaman investasi Dalam Negeri (PMDN), dan total investasi daerah, fungsi *stabilisasi* dalam persamaan jumlah uang beredar dan tingkat inflasi, fungsi *distribusi* dalam persamaan jumlah unit usaha dan penyerapan tenaga kerja, dan pengaruh pajak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dispesifikasikan dalam persamaan Produk Domestik Regional Bruto. Model diduga dengan menggunakan teknik *Two-Stage Least Squares* (2SLS) dan simulasi menggunakan teknik SIMNLIN.

4.2.1. Keragaan Umum Pendugaan Model

Hasil pendugaan model dapat dilihat pada Tabel 6 – 14. Secara keseluruhan hasil pendugaan terhadap persamaan-persamaan masing-masing fungsi pajak menunjukkan semua peubah yang dimasukkan ke dalam setiap persamaan perilaku memenuhi hipotesis

yang dapat diterima sesuai teori ekonomi. Nilai Koefisien Determinasi (R^2) yang dicapai pada 66.67 % persamaan (6 persamaan) adalah cukup tinggi berkisar antara 0.6466 hingga 0.9956. Sedangkan sebanyak 33.33 % (3 persamaan) memiliki nilai Koefisien Determinasi (R^2) sebesar 0.3010 hingga 0.3988. Dari variasi nilai ini, diperoleh keseluruhan persamaan dalam model memiliki nilai Koefisien Determinasi (R^2) rata-rata sebesar 0.7378. Ini menunjukkan lebih dari 70 % variasi masing-masing peubah endogen dapat dijelaskan oleh variasi peubah-peubah penjelas yang dimasukkan dalam masing-masing persamaan. Khusus untuk tiga persamaan dengan nilai Koefisien Determinasi (R^2) yang rendah (0.3010 hingga 0.3988) secara statistik adalah lemah dan harus dikeluarkan. Namun sesuai kriteria *apriori* yaitu sesuai dengan teori ekonomi sudah memenuhi syarat dan diterima dan secara model tidak dapat dikeluarkan karena akan menghilangkan fungsi pajak yang hendak diukur, maka ketiga persamaan tersebut tetap dipertahankan di dalam model untuk tujuan simulasi.

Nilai statistik F yang ditunjukkan oleh nilai probabilitas F rata-rata persamaan sebesar 0.0107. Uji F merupakan uji signifikansi terhadap statistik R^2 (Pindyck dan Rubinfeld, 2008). Nilai probabilitas tersebut memiliki arti R^2 berbeda nyata dengan nol pada taraf kepercayaan 99 %, yang berarti peubah-peubah penjelas dalam setiap persamaan secara bersama-sama dapat menjelaskan variasi setiap peubah endogennya.

Uji statistik t digunakan untuk menguji apakah masing-masing peubah penjelas secara individual berpengaruh nyata atau tidak terhadap peubah endogen. Teloransi signifikansi uji t yang digunakan dalam penelitian ini sebesar $\alpha = 20$ %. Pertimbangan teloransi signifikansi ini didasarkan pada fakta bahwa variabel-variabel ekonomi dalam penelitian ini mencakup ruang lingkup makroekonomi luas dan tidak dapat dikontrol. Saling pengaruh antara variabel dalam lingkungan yang luas dan tidak dapat dikontrol, akan mengindikasikan bahwa perubahan nilai setiap variabel dapat bebas dipengaruhi oleh banyak faktor yang tidak dapat dikendalikan secara pasti. Berdasarkan kondisi ini, digunakan teloransi signifikansi yang longgar hingga mencapai $\alpha = 20$ %.

Sesuai hasil uji t sebanyak 66.67 % atau 29 parameter dugaan peubah penjelas dalam persamaan berbeda nyata dengan nol pada taraf nyata $\alpha = 1 - 5$ %, sebanyak 15.38% atau 6 parameter dugaan peubah penjelas berbeda nyata dengan nol pada taraf nyata $\alpha = 6 - 10$ %, sebanyak 12.82 % atau 5 parameter dugaan peubah penjelas berbeda nyata dengan nol pada taraf nyata $\alpha = 11 - 15$ %, dan 5.13 % atau 2 parameter dugaan peubah penjelas berbeda nyata dengan nol pada taraf nyata $\alpha = 16 - 20$ %. Berarti semua parameter dugaan peubah penjelas signifikan mempengaruhi peubah yang dijelaskan.

4.2.2. Perilaku dan Kapasitas Peubah Penentu Fungsi Pajak

4.2.2.1. Rencana Penerimaan Pemerintah Daerah

Hasil pendugaan persamaan rencana penerimaan pemerintah daerah disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Hasil Pendugaan Parameter Peubah Rencana Penerimaan Pemerintah (REVGGOV)

Peubah yang Dijelaskan dan Penjelas	Parameter Dugaan	Prob. T	Taraf nyata	Elastisitas	
				Jangka Pendek	Jangka Panjang
Penerimaan Pemerintah (REVGGOV)					
Intercept	-152345				
Penerimaan Pajak Daerah (TAX)	0.5704	0.0158	A	0.57	0.61
Bagi Hasil Pajak&Non-Pajak (BHTNT)	3.2736	0.0221	A	0.49	0.52
Retribusi Daerah (RETR)	0.5540	0.0441	A	0.05	0.05
Laba BUMD (LBUMD)	1.4429	0.0453	A	0.06	0.07
Prod. Dom. Reg. Bruto (PDRB)	0.0546	0.0001	A	0.98	1.04
Lag Rencana Anggaran (LREVGGOV)	0.0595	0.1723	D	0.11	0.12
Prob. F = 0.0001	R-Sq = 0.9949	Adj R-Sq = 0.9937	DW = 1.257		

Keterangan :

A = Berpengaruh nyata pada taraf $\alpha = 1 - 5 \%$

D = Berpengaruh nyata pada taraf $\alpha = 15 - 20 \%$.

Nilai Koefisien Determinasi (R^2), uji F dan uji t hasil pendugaan yang diperoleh menurut kriteria statistik adalah baik. Penerimaan pajak daerah, retribusi dan laba BUMD sebagai komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) berhubungan positif dan signifikan mempengaruhi rencana anggaran pemerintah atau penerimaan pemerintah Daerah Jawa Tengah. Begitu juga bagi hasil pajak dan non-pajak antara daerah dengan pemerintah pusat signifikan mempengaruhi rencana anggaran penerimaan pemerintah daerah. Sedangkan perkembangan keadaan ekonomi daerah yang ditunjukkan oleh nilai Produk Domestik Bruto turut mempengaruhi perkembangan anggaran penerimaan pemerintah daerah dalam hubungan yang positif dan signifikan.

Makin tinggi nilai penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD, dan bagi hasil pajak dan non-pajak maka makin tinggi nilai rencana anggaran penerimaan pemerintah daerah. Dengan kata lain makin tinggi nilai peubah-peubah tersebut berpengaruh positif terhadap peningkatan rencana penerimaan pemerintah daerah. Sedangkan makin membaik kegiatan ekonomi daerah yaitu makin tinggi PDRB akan berpengaruh mendorong peningkatan rencana anggaran penerimaan pemerintah daerah. Oleh karena itu keadaan rencana penerimaan pemerintah daerah akan bergerak searah dengan kenaikan positif dari unsur-unsur penerimaan daerah dan juga oleh keadaan ekonomi daerah yang makin membaik.

Besarnya kekuatan atau kapasitas masing-masing peubah penjelas dalam mempengaruhi yaitu mendorong perubahan rencana anggaran penerimaan pemerintah Daerah Jawa Tengah dapat ditunjukkan oleh nilai elastisitas masing-masing peubah. Nilai elastisitas menunjukkan persentase perubahan pada suatu variabel sebagai akibat dari 1 (satu) persen perubahan pada variabel lainnya (Pindyck dan Rubinfeld, 2005). Jika nilai elastisitas > 1 disebut elastis yang berarti sebesar 1 % kenaikan pada satu variabel memiliki kekuatan mendorong kenaikan pada variabel yang dipengaruhinya sebesar lebih dari 1 % atau sebesar nilai elastisitas tersebut. Sebaliknya jika nilai elastisitas < 1 disebut inelastis yang berarti sebesar 1 % kenaikan pada satu variabel memiliki kekuatan mendorong kenaikan pada variabel yang dipengaruhinya lebih kecil dari 1 % atau sebesar nilai elastisitas tersebut. Jika nilai elastisitas sama dengan 1 (satu) disebut elastis unit yang berarti 1 % kenaikan pada satu variabel memiliki kekuatan mendorong kenaikan yang sama sebesar 1 % pada variabel yang dipengaruhinya.

Hasil analisis elastisitas masing-masing peubah pada Tabel 6 di atas menunjukkan dalam jangka pendek tiga peubah pokok sebagai komponen utama pembentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kemudian menjadi kontributor utama pada perencanaan jumlah anggaran penerimaan pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu peubah penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dan laba BUMD, ketiganya memiliki nilai elastisitas kurang dari satu atau bersifat inelastis. Bila dilihat, besaran nilai elastisitas yang menunjukkan kemampuan masing-masing peubah untuk merubah rencana anggaran penerimaan pemerintah daerah dari peubah retribusi daerah dan laba BUMD dalam jangka pendek maupun jangka panjang adalah sangat kecil (0.05 – 0.05 dan 0.06 – 0.07). Artinya, misalnya dalam jangka pendek retribusi daerah dan laba BUMD masing-masing meningkat 10 % maka hanya akan mendorong kenaikan rencana anggaran penerimaan pemerintah daerah sebesar 0.5 % dan 0.6 %. Ini menunjukkan bahwa kekuatan kedua peubah pokok tersebut dalam mendukung perubahan rencana anggaran penerimaan pemerintah daerah adalah sangat kecil. Sebaliknya penerimaan pajak daerah, meskipun elastisitasnya masih lebih kecil satu (0.57 – 0.61) tetapi merupakan satu-satunya peubah pokok yang memiliki pengaruh lebih besar dari kedua peubah yang lain untuk merubah rencana nilai anggaran penerimaan pemerintah Daerah Jawa Tengah. Oleh karena itu sebagai peubah pokok dikatakan bahwa penerimaan pajak daerah memiliki kekuatan utama menentukan rencana anggaran penerimaan pemerintah daerah. Dapat diinterpretasikan, dalam jangka pendek atau per periode setahun kenaikan penerimaan pajak daerah sebesar 10 % dapat menyebabkan rencana anggaran pemerintah daerah naik sebesar 5.7 %. Sedangkan dalam jangka panjang

penerimaan pajak daerah berpengaruh meningkatkan rencana anggaran penerimaan pemerintah menjadi 6.1 %.

Peubah bagi hasil pajak dan non-pajak yang merupakan sumber lain dalam menunjang anggaran penerimaan pemerintah daerah, sesuai nilai elastisitasnya sebesar 0.49 dalam jangka pendek dan 0.52 pada jangka panjang. Besaran elastisitas ini masih bersifat inelastis tetapi relatif mendekati elastisitas penerimaan pajak daerah. Oleh karena itu kemampuannya mendekati kemampuan pajak daerah dalam merubah anggaran penerimaan pemerintah daerah. Kekuatan yang lebih besar yang dapat merubah rencana anggaran penerimaan pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah berasal dari kecenderungan perubahan nilai peubah Produk Domestik Regional Bruto yang mewakili trend perkembangan perekonomian daerah. Ini ditunjukkan oleh nilai elastisitas peubah PDRB sebesar 0.94 dalam jangka pendek dan 1.04 dalam jangka panjang. Berarti pada periode jangka pendek yaitu selama setahun, jika keadaan ekonomi daerah membaik yang ditandai dengan kenaikan PDRB sebesar 10 % saja, dapat menyebabkan rencana anggaran pemerintah daerah akan naik sebesar 9.4 %. Sedangkan dalam waktu jangka panjang, PDRB yang naik sebesar 10 % menyebabkan rencana anggaran penerimaan pemerintah daerah naik menjadi 10.4 %. Artinya pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih tinggi akan mempercepat kenaikan rencana anggaran penerimaan daerah.

4.2.2.2. Pengeluaran Pemerintah

Hasil pendugaan persamaan pengeluaran pemerintah disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Hasil Pendugaan Parameter Peubah Pengeluaran Pemerintah (EGOV)

Peubah yang Dijelaskan dan Penjelas	Parameter Dugaan	Prob. T	Taraf nyata	Elastisitas	
				Jangka Pendek	Jangka Panjang
Pengeluaran Pemerintah (EGOV)					
Intercept	-64796				
Penerimaan Pemerintah (REVGGOV)	0.6168	0.0002	A	0.56	0.70
Penge. Invest. Pemerintah (INVG)	1.1260	0.0001	A	0.14	0.17
Penge. Rutin Pemerintah (ERUT)	0.7535	0.0055	A	0.31	0.38
Lag Penge. Pemerintah (LEGOV)	-0.2391	0.0160	A	-0.17	-0.21
Prob. F = 0.0001	R-Sq = 0.9871	Adj R-Sq = 0.9851		DW = 1.943	

Keterangan :

A = Berpengaruh nyata pada taraf $\alpha = 1 - 5\%$.

Hasil pendugaan pada Tabel 7 menunjukkan nilai Koefisien Determinasi (R^2), uji F dan uji t yang diperoleh menurut kriteria statistik adalah baik. Rencana anggaran penerimaan pemerintah daerah, pengeluaran investasi pemerintah daerah, dan pengeluaran rutin pemerintah daerah berhubungan positif dan signifikan mempengaruhi pengeluaran

pemerintah Daerah Jawa Tengah. Makin tinggi masing-masing nilai rencana anggaran penerimaan pemerintah, besaran pengeluaran untuk investasi pemerintah daerah, dan besaran pengeluaran/belanja rutin pemerintah daerah maka makin tinggi pula nilai total pengeluaran pemerintah daerah.

Hasil analisis elastisitas masing-masing peubah yang disajikan pada Tabel 7 menunjukkan semua peubah pengaruh terhadap pengeluaran pemerintah daerah memiliki nilai elastisitas lebih kecil satu (inelastis) baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Ini mengindikasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang tidak ada peubah utama yang memicu perubahan yang besar pada pengeluaran pemerintah Daerah Jawa Tengah. Sesuai besaran elastisitas, kedua komponen utama dalam pengeluaran pemerintah daerah yaitu pengeluaran investasi pemerintah atau pengeluaran pemerintah daerah untuk tujuan pembangunan wilayah dan pengeluaran rutin untuk penyelenggaraan administrasi pemerintah daerah, masing-masing memiliki nilai elastisitas 0.14 dan 0.17 serta 0.31 dan 0.38 untuk jangka pendek dan jangka panjang. Bila dicermati, dengan nilai elastisitas yang kecil ini (inelastis) berarti kekuatan kedua item pengeluaran pemerintah daerah (pendorong internal) tidak cukup kuat mendorong kenaikan yang kuat pada penetapan pengeluaran pemerintah daerah. Item pengeluaran rutin sebagai komponen pokok membiayai administrasi untuk kelangsungan hidup pemerintahan di daerah tidak menunjukkan efek yang kuat untuk naik dengan drastis. Hal ini dimaklumi sebagai kapasitas penyelenggaraan administrasi pemerintah daerah sudah berjalan dengan baik dan memenuhi standar yang dikehendaki. Bila standar pelayanan administrasi pemerintah daerah belum berjalan baik dan masih membutuhkan perbaikan maka konsekuensinya akan masih membutuhkan alokasi anggaran yang besar dan akan terlihat efeknya pada nilai elastisitas yang dihasilkan yakni lebih tinggi.

Selain itu nilai elastisitas dari item pengeluaran investasi pemerintah daerah yang kecil menunjukkan bahwa dorongan pemerintah daerah untuk memperluas pembangunan proyek-proyek di daerah dari tahun ke tahun tidak selalu meningkat tajam. Item pengeluaran untuk kegiatan investasi dan pembangunan oleh pemerintah daerah memiliki potensi besar dapat diekspansi untuk tujuan mendorong pertumbuhan produksi, lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja di daerah. Oleh karena itu bila orientasi pemerintah daerah lebih intensif ke pembangunan daerah sesuai tujuan spesifik yang akan diperoleh dan tidak tergantung atau dibatasi oleh keadaan ketersediaan anggaran maka item pengeluaran investasi ini akan memiliki kemampuan kuat mendorong peningkatan yang besar pada pengeluaran belanja pemerintah daerah. Sesuai nilai elastisitas, item

pengeluaran investasi pemerintah ini juga memiliki nilai elastisitas kecil, berarti tidak terdapat potensi yang mendorong peningkatan pengeluaran pemerintah.

Dapat diperbandingkan bahwa elastisitas dari kedua item pokok pengeluaran pemerintah daerah yaitu pengeluaran investasi dan pengeluaran rutin pemerintah daerah adalah kecil. Sedangkan nilai elastisitas dari peubah rencana anggaran penerimaan pemerintah adalah lebih besar yaitu 0.56 dalam jangka pendek dan 0.70 dalam jangka panjang. Ini berarti peningkatan rencana anggaran penerimaan sebesar 10 % dapat mendorong kenaikan pengeluaran pemerintah sebesar 5.6 % dalam periode jangka pendek/tahunan dan 7.0 % dalam jangka panjang. Sesuai hasil ini dapat dikatakan bahwa dorongan ekspansi pada pengeluaran pemerintah daerah lebih utama berasal dari peningkatan rencana anggaran penerimaan, dan berarti bukan dari ekspansi item-item kegiatan pokok didalam lingkup belanja pemerintah daerah itu sendiri. Indikasi yang diperoleh disini adalah ekspansi pada pengeluaran pemerintah daerah dominan ditarik dari peluang peningkatan penerimaan pajak yang kemudian mengalir kepada rencana anggaran penerimaan pemerintah dan seterusnya mengalir kepada pengeluaran pemerintah.

4.2.2.3. Penanaman Modal Dalam Negeri

Hasil pendugaan persamaan Penanaman Modal Dalam Negeri disajikan dalam Tabel 8.

Tabel 8. Hasil Pendugaan Parameter Peubah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Peubah yang Dijelaskan dan Penjelasan	Parameter Dugaan	Prob. T	Taraf nyata	Elastisitas	
				Jangka Pendek	Jangka Panjang
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)					
Intercept	2213885.0				
Suku Bunga (IR)	-107140.0	0.0166	A	-0.51	-0.85
Pajak Per Unit Usaha (TAXUS)	-17.2612	0.0199	A	-0.90	-1.52
Pengeluaran Pemerintah (EGOV)	2.0109	0.0135	A	1.22	2.05
Lag PMDN (LPMDN)	0.4052	0.0160	A	0.40	0.67
Prob. F = 0.0083	R-Sq = 0.3988	Adj R-Sq = 0.3063		DW = 2.200	

Keterangan :

A = Berpengaruh nyata pada taraf $\alpha = 1 - 5\%$.

Hasil pendugaan pada Tabel 8 menunjukkan nilai Koefisien Determinasi (R^2), uji F dan uji t yang diperoleh menurut kriteria statistik adalah baik. Penanaman modal Dalam Negeri signifikan dipengaruhi oleh peubah utama penentu investasi yaitu suku bunga dalam hubungan yang negatif. Makin tinggi tingkat bunga rata-rata berpengaruh makin menurunkan jumlah penanaman modal Dalam Negeri di Daerah Jawa Tengah. Investasi sangat diharapkan oleh pemerintah daerah untuk dilakukan para pengusaha di Jawa

Tengah. Namun pemerintah menarik pajak yang menjadi beban bagi para pengusaha untuk berinvestasi. Hasil pendugaan menunjukkan pajak per unit usaha yang ditanggung pengusaha signifikan mempengaruhi penanaman modal Dalam Negeri dalam hubungan yang negatif. Makin tinggi beban pajak per unit usaha makin menurun investasi yang ditanamkan Dalam Negeri. Besaran pengeluaran pemerintah merupakan suatu faktor pendorong bagi para investor menanamkan modalnya karena besaran pengeluaran pemerintah berhubungan potensi ekspansi dalam perekonomian dimana bagi para investor diterima sebagai kondisi peluang pengembangan usaha. Hasil pendugaan menunjukkan pengeluaran pemerintah signifikan mempengaruhi penanaman modal Dalam Negeri dalam hubungan yang positif.

Hasil analisis elastisitas masing-masing peubah menunjukkan peubah suku bunga rata-rata di Daerah Jawa Tengah dalam hubungannya dengan penanaman modal Dalam Negeri memiliki nilai elastisitas -0.51 dalam jangka pendek dan -0.85 dalam jangka panjang. Berarti baik jangka pendek maupun jangka panjang, peningkatan suku bunga rata-rata misalnya hingga 10% , hanya berpengaruh menurunkan penanaman modal Dalam Negeri dalam jumlah yang kecil yaitu 5.1% dalam jangka pendek dan 8.5% dalam jangka panjang. Pengaruh negatif kenaikan suku bunga ini umumnya dianggap masih dalam teloransi yang wajar sebagai faktor pengaruh internal dalam pasar finansial. Dalam kondisi pasar stabil dan tidak ada gejolak, hubungan kenaikan suku bunga tidak banyak merubah intensitas investasi.

Kondisi lain yang berpotensi menjadi faktor penghambat penanaman investasi Dalam Negeri adalah beban pajak per unit usaha atau beban pajak per perusahaan yang makin besar. Beban pajak memiliki kekuatan besar menghambat penanaman investasi karena menjadi beban pembiayaan usaha. Nilai elastisitas peubah pajak per unit usaha adalah sebesar -0.90 dalam jangka pendek dan -1.52 dalam jangka panjang. Nilai elastisitas ini menunjukkan beban pajak memiliki kekuatan besar menghambat penanaman modal Dalam Negeri dimana pada jangka pendek hambatan itu cukup potensial, sedangkan dalam jangka panjang kekuatan hambatan itu sangat besar. Indikasi ini dari sisi besaran nilai menunjukkan kenaikan beban pajak hingga 10% saja sanggup menghambat penanaman modal Dalam Negeri hingga 9% pada jangka pendek/periode per tahun dan mencapai sebesar 15.2% dalam jangka panjang. Ini berarti bilamana dalam jangka panjang secara kontinu pajak per unit usaha terus menerus dinaikan maka dapat dipastikan efeknya adalah mematikan keinginan investasi yang dilakukan oleh para investor. Sesuai hasil ini dapat

dikatakan peningkatan nilai pajak yang menjadi beban bagi perusahaan, sangat efektif menurunkan penanaman modal Dalam Negeri di Provinsi Jawa Tengah.

Jika beban pajak per unit usaha menjadi kendala bagi dunia usaha untuk berinvestasi, daya tarik berinvestasi muncul dari seberapa besar anggaran belanja pemerintah daerah ditetapkan. Para pengusaha melihat terbuka peluang berusaha dan berinvestasi jika pemerintah daerah sebagai pengambil kebijakan pembangunan di daerah memberi peluang untuk hal itu. Peluang itu datang dari seberapa besar pemerintah daerah menetapkan besar pengeluarannya pada tahun berjalan. Makin meningkat anggaran belanja pemerintah daerah, para pengusaha akan memberikan respon positif dalam berinvestasi.

Nilai elastisitas pada Tabel 8 menunjukkan peubah pengeluaran pemerintah memiliki elastisitas bersifat elastis yaitu sebesar 1.22 dalam jangka pendek dan 2.05 dalam jangka panjang. Nilai elastisitas yang bersifat elastis memiliki pengertian peubah bersangkutan yakni pengeluaran pemerintah berperan sebagai sebuah instrumen kebijakan efektif dalam menggiring penanaman investasi Dalam Negeri di Provinsi Jawa Tengah. Karena berdasarkan nilai elastisitasnya, dalam periode jangka pendek/per tahun jika pemerintah daerah berhasil menaikkan pengeluarannya sebesar 10 % saja, akan memberikan dukungan kenaikan bagi potensi penanaman investasi sebesar 10.2 %. Jika hal itu terus terjadi dalam jangka panjang maka akan terjadi booming investasi menjadi dua kali lipat lebih besar (20.5 %). Bila dicermati, meskipun pada satu pihak pajak yang ditarik pemerintah sebagai sumber penerimaannya menjadi hambatan bagi penanaman investasi, namun pada sisi lain besaran pengeluaran pemerintah menjadi faktor penarik bagi penanaman investasi. Pemerintah daerah sebagai regulator dalam orientasi membangun pertumbuhan ekonomi daerah ke depan, tinggal mengatur dengan arif bagaimana membangun kapasitas ekonomi daerah yang kuat tanpa mengabaikan pos penerimaannya yang bersumber dari pajak. Orientasi mungkin saja keliru jika pemerintah daerah lebih utama hanya mengejar besaran penerimaan pajak dan mengabaikan penciptaan fundamen dunia usaha yang kuat di daerahnya.

4.2.2.4. Penanaman Modal Asing

Hasil pendugaan persamaan penanaman modal asing disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9. Hasil Pendugaan Parameter Peubah Penanaman Modal Asing (PMA)

Peubah yang Dijelaskan dan Penjelasan	Parameter Dugaan	Prob. T	Taraf nyata	Elastisitas	
				Jangka Pendek	Jangka Panjang
Penanaman Modal Asing (PMA)					
Intercept	-7726996.0				
Suku Bunga (IR)	448790.0	0.0165	A	1.16	1.27
Nilai Tukar (ER)	551.7823	0.0405	A	0.56	0.62
Pajak Per Unit Usaha (TAXUS)	-31.8542	0.0355	A	-0.91	-1.00
Pengeluaran Pemerintah (EGOV)	3.8041	0.0726	B	1.26	1.39
Impor (IM)	0.1023	0.0615	B	0.43	0.47
Lag Pen. Modal Asing (LPMA)	-0.1008	0.1432	C	-0.09	-0.10
Prob. F = 0.0411	R-Sq = 0.3980	Adj R-Sq = 0.2475		DW = 1.879	

Keterangan :

- A = Berpengaruh nyata pada taraf $\alpha = 1 - 5\%$
- B = Berpengaruh nyata pada taraf $\alpha = 6 - 10\%$
- C = Berpengaruh nyata pada taraf $\alpha = 11 - 15\%$.

Hasil pendugaan pada Tabel 9 menunjukkan nilai Koefisien Determinasi (R^2), uji F dan uji t yang diperoleh menurut kriteria statistik adalah baik. Penanaman modal Asing signifikan dipengaruhi oleh peubah utama penentu investasi yaitu suku bunga dalam hubungan yang positif. Makin tinggi tingkat bunga rata-rata berpengaruh makin meningkatkan jumlah penanaman modal Asing di Daerah Jawa Tengah. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah, Pemerintah Daerah membuka peluang bagi masuknya Investor Asing. Indikator yang berpotensi menarik masuknya Investor Asing adalah suku bunga. Jika suku bunga domestik makin tinggi maka para investor akan masuk dan berinvestasi di Dalam Negeri. Hasil pendugaan menunjukkan nilai parameter suku bunga adalah positif dan karena itu hasil ini sesuai atau memenuhi landasan teori yang ada.

Nilai tukar signifikan mempengaruhi penanaman modal Asing dalam hubungan yang positif. Makin tinggi nilai tukar maka makin tinggi penanaman investasi Asing. Nilai tukar yang dipakai dalam studi ini adalah nilai tukar dolar yaitu berapa rupiah per dolar. Jadi jika nilai tukar dolar makin tinggi (menguat) yang berarti rupiah makin melemah maka akan mendorong para Investor Asing masuk dan menanamkan modalnya di Dalam Negeri. Seperti pada penanaman modal Dalam Negeri di bagian atas, pengenaan pajak bagi pengusaha merupakan beban di dalam berinvestasi. Hasil pendugaan menunjukkan pajak per unit usaha yang ditanggung pengusaha signifikan mempengaruhi penanaman modal Asing dalam hubungan yang negatif. Makin tinggi beban pajak per unit usaha maka makin menurun investasi Asing yang ditanamkan.

Besaran pengeluaran pemerintah juga merupakan faktor pendorong bagi para Investor Asing menanamkan modalnya di Dalam Negeri karena besaran pengeluaran

pemerintah merupakan peluang terbuka berinvestasi. Hasil pendugaan menunjukkan pengeluaran pemerintah signifikan mempengaruhi penanaman modal Asing dalam hubungan yang positif. Besaran nilai impor daerah signifikan mempengaruhi penanaman modal Asing di Jawa Tengah dalam hubungan yang positif. Makin meningkat besaran impor, makin memberikan kesempatan bagi Investor Asing menanamkan modalnya di Jawa Tengah. Hal ini berhubungan dengan kesepakatan di dalam perdagangan yang saling menguntungkan bagi pelaku Asing dan Domestik.

Hasil analisis elastisitas masing-masing peubah pada Tabel 9 menunjukkan peubah suku bunga rata-rata di Daerah Jawa Tengah dalam hubungannya dengan penanaman modal Asing memiliki nilai elastisitas 1.16 dalam jangka pendek dan 1.27 dalam jangka panjang. Nilai elastisitas suku bunga ini sangat besar atau bersifat elastis yang berarti suku bunga efektif menjadi daya penarik bagi masuknya penanaman modal Asing. Peningkatan suku bunga rata-rata misalnya hingga 10 % dapat mendorong peningkatan penanaman modal Asing lebih dari 10 % atau sebesar 11.6 % dalam jangka pendek, dan sebesar 12.7 % dalam jangka panjang. Hasil analisis ini memberi petunjuk bahwa investasi asing dapat mengalir masuk dalam jumlah yang besar jika suku bunga dinaikan. Namun menaikkan suku bunga bertolak belakang dengan upaya mendorong pertumbuhan investasi Dalam Negeri. Pada satu sisi Investor Asing diperlukan untuk menggerakkan investasi Dalam Negeri, namun kehadiran investasi asing menciptakan kondisi yang secara permanen menghambat bangkitnya investasi Domestik melalui pergerakan suku bunga yang makin meningkat. Oleh karena itu Pemerintah Daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memberikan peluang bagi penguatan kemampuan Dalam Negeri, perlu mengkaji dengan cermat arah perubahan suku bunga di daerah.

Perubahan nilai tukar mendorong masuknya investasi asing. Sesuai nilai elastisitas, dalam jangka pendek elastisitas nilai tukar sebesar 0.56 dan jangka panjang sebesar 0.62 atau bersifat inelastis. Berarti baik jangka pendek maupun jangka panjang, kenaikan nilai tukar dolar terhadap rupiah tidak memberikan dorongan kuat masuknya investasi asing ke Jawa Tengah. Pada umumnya kenaikan nilai tukar memberi peluang bagi masuknya investasi asing, namun tidak menyebabkan investasi asing membludak.

Sama seperti yang dihadapi investor Dalam Negeri, faktor penghambat bagi lajunya penanaman investasi Asing di Jawa Tengah adalah beban pajak per unit usaha yang ditanggung investor. Beban pajak memiliki kekuatan besar menghambat penanaman investasi karena menjadi beban pembiayaan usaha. Nilai elastisitas peubah pajak per unit usaha adalah sebesar -0.91 dalam jangka pendek dan -1.00 dalam jangka panjang.

Meskipun dalam jangka pendek masih bersifat inelastis (-0.91) sedangkan jangka panjang bersifat elastis unit, namun nilai elastisitas ini sebenarnya sudah cukup kuat berpotensi menjadi kendala mengalirnya investasi asing ke Jawa Tengah. Bila dicermati, baik Investor Asing maupun Domestik sama-sama menghadapi beban yang sama ketika ingin berinvestasi yaitu beban pajak usaha. Malah beban yang lebih besar akan ditanggung oleh Investor Domestik yaitu pada jangka panjang, dimana diindikasikan dari nilai elastisitasnya yang lebih besar yaitu -1.52 (Tabel 8).

Daya tarik bagi masuknya penanaman modal asing di Jawa Tengah juga ditentukan oleh seberapa besar anggaran belanja pemerintah daerah ditetapkan. Makin meningkat anggaran belanja pemerintah daerah, para Investor Asing memberikan respon positif dalam berinvestasi. Nilai elastisitas peubah pengeluaran pemerintah sebesar 1.26 dalam jangka pendek dan 1.39 dalam jangka panjang. Nilai elastisitas ini bersifat elastis baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang sehingga dapat dikatakan pengeluaran pemerintah daerah berperan sebagai sebuah instrumen kebijakan efektif mendorong penanaman investasi Asing ke Daerah Jawa Tengah. Dalam periode jangka pendek/per tahun jika pemerintah daerah berhasil menaikkan pengeluarannya sebesar 10 %, akan memberikan kenaikan bagi penanaman investasi Asing sebesar 12.6 %. Dalam jangka panjang kenaikan penanaman investasi Asing dapat mencapai 13.9 %. Bila diperbandingkan antara potensi ekspansi pengeluaran pemerintah daerah terhadap peluang investasi bagi pengusaha Dalam Negeri dengan pengusaha asing, maka nilai elastisitas keduanya menunjukkan daya tarik ekspansi pengeluaran pemerintah daerah lebih besar direspon oleh para pengusaha Dalam Negeri.

4.2.2.5. Jumlah Uang Beredar

Hasil pendugaan persamaan jumlah uang beredar disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10. Hasil Pendugaan Parameter Peubah Jumlah Uang Beredar (MS)

Peubah yang Dijelaskan dan Penjelasan	Parameter Dugaan	Prob. T	Taraf nyata	Elastisitas	
				Jangka Pendek	Jangka Panjang
Jumlah Uang Beredar (MS)					
Intercept	3920874.0				
Suku Bunga (IR)	-646244.0	0.0516	A	-0.15	-0.48
Pengeluaran Pemerintah (EGOV)	16.4993	0.0038	A	0.50	1.59
Lag Jumlah Uang Beredar (LMS)	0.6831	0.0001	A	0.58	1.83
Prob. F = 0.0001	R-Sq = 0.9548	Adj R-Sq = 0.9498		DW = 2.502	

Keterangan :

A = Berpengaruh nyata pada taraf $\alpha = 1 - 5\%$.

Hasil pendugaan pada Tabel 10 menunjukkan nilai Koefisien Determinasi (R^2), uji F dan uji t yang diperoleh menurut kriteria statistik adalah baik. Jumlah uang beredar signifikan dipengaruhi oleh suku bunga dalam hubungan yang negatif. Makin tinggi tingkat bunga rata-rata berpengaruh makin menurunkan jumlah uang beredar dalam masyarakat di Daerah Jawa Tengah. Secara teoritis suku bunga dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengendalikan jumlah uang beredar. Peredaran uang yang terlalu banyak akan berpengaruh pada laju inflasi, karena itu suku bunga dapat diatur pemerintah untuk mengendalikan jumlah uang beredar dalam masyarakat. Jika suku bunga ditetapkan makin tinggi maka di pasar finansial dapat menyerap uang beredar di tangan masyarakat karena masyarakat cenderung akan menabung untuk memperoleh return bunga di masa datang. Sebaliknya suku bunga ditetapkan lebih rendah dapat menyebabkan masyarakat menarik uangnya dan memilih lebih banyak memegang uang di tangan, akibatnya uang beredar makin bertambah.

Pengeluaran pemerintah merupakan suatu saluran bagi beredarnya uang di masyarakat. Setiap tahun pemerintah daerah menetapkan anggaran belanjanya dan anggaran belanja tersebut merupakan jumlah uang potensial yang akan beredar dalam masyarakat ketika anggaran belanja direalisasi untuk membelanjakan berbagai pengeluaran pemerintah daerah. Makin besar penetapan anggaran belanja pemerintah daerah akan semakin besar jumlah uang yang akan beredar dalam masyarakat. Hasil pendugaan pada Tabel 10 menunjukkan jumlah uang beredar signifikan dipengaruhi oleh peubah pengeluaran pemerintah daerah dalam hubungan yang positif. Makin tinggi pengeluaran pemerintah daerah berpengaruh makin meningkatkan jumlah uang beredar dalam masyarakat di Daerah Jawa Tengah.

Hasil analisis elastisitas masing-masing peubah pada Tabel 10 menunjukkan peubah suku bunga rata-rata di Daerah Jawa Tengah memiliki nilai elastisitas -0.15 dalam jangka pendek dan -0.48 dalam jangka panjang. Nilai elastisitas suku bunga ini lebih kecil dari satu atau bersifat inelastis yang berarti perubahan suku bunga tidak efektif merubah jumlah uang beredar di masyarakat secara drastis. Berdasarkan nilai, kenaikan suku bunga rata-rata hingga 10 % hanya menyebabkan penurunan jumlah uang beredar sebesar 1.5 % dalam jangka pendek, dan sebesar 4.5 % dalam jangka panjang. Hasil analisis ini memberi petunjuk bahwa jumlah uang beredar cenderung berkurang dalam jumlah yang relatif kecil ketika suku bunga rata-rata di Jawa Tengah cenderung bergerak naik. Indikasi ini menjelaskan bahwa perubahan dalam jumlah uang beredar akibat perubahan pada suku

bunga berlangsung dalam pola stabil. Artinya tidak ada kecenderungan perubahan yang besar dan berfluktuasi.

Sebaliknya pengeluaran pemerintah yang menjadi saluran bagi bertambahnya uang beredar, sesuai hasil pendugaan memiliki nilai elastisitas 0.50 atau bersifat inelastis dalam jangka pendek, dan 1.59 atau bersifat elastis dalam jangka panjang. Peningkatan pengeluaran pemerintah sebesar 10 % akan meningkatkan jumlah uang beredar hanya 5.0 % dalam jangka pendek. Ini berarti dalam jangka pendek atau periode per tahun, peningkatan pengeluaran pemerintah daerah tidak efektif meningkatkan jumlah uang beredar. Namun dalam jangka panjang, pengaruh pengeluaran pemerintah ini berubah menjadi sangat efektif meningkatkan jumlah uang beredar hingga 15.9 % jika pengeluaran pemerintah meningkat 10 %. Pada satu sisi, efek ini dianggap positif karena peningkatan uang beredar merupakan alat untuk menambah produksi barang dan jasa dalam perekonomian. Namun pada sisi lain, peningkatan jumlah uang beredar akan mendorong kenaikan harga-harga dalam masyarakat, dan karena itu perlu diwaspadai bilamana laju inflasi di daerah sudah begitu tinggi.

4.2.2.6. Indeks Harga Konsumen

Hasil pendugaan terhadap persamaan indeks harga konsumen (IHK) disajikan pada Tabel 11.

Tabel 11. Hasil Pendugaan Parameter Peubah Indeks Harga Konsumen (IHK)

Peubah yang Dijelaskan dan Penjelas	Parameter Dugaan	Prob. T	Taraf nyata	Elastisitas	
				Jangka Pendek	Jangka Panjang
Indeks Harga Konsumen (IHK)					
Intercept	165.8316				
Jumlah Uang Beredar (MS)	0.000000632	0.0052	A	0.13	0.16
Nilai Tukar (ER)	0.0047	0.0623	B	0.09	0.11
Lag Indeks Harga Konsumen (LIHK)	0.1951	0.0685	B	0.19	0.23
Prob. F = 0.0001	R-Sq = 0.6466	Adj R-Sq = 0.6074		DW = 1.929	

Keterangan :

- A = Berpengaruh nyata pada taraf $\alpha = 1 - 5 \%$.
- D = Berpengaruh nyata pada taraf $\alpha = 16 - 20 \%$.

Sesuai kriteria statistik Koefisien Determinasi (R^2), uji F dan uji t, hasil pendugaan yang diperoleh pada Tabel 11 cukup baik. Indeks Harga Konsumen (IHK) menunjukkan perubahan harga rata-rata sekelompok barang dalam periode waktu tertentu. Oleh karena itu perkembangan indeks harga menunjukkan keadaan dimana harga-harga dalam perekonomian berubah dari waktu ke waktu. Fluktuasi harga-harga dipengaruhi seberapa banyak kecenderungan jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Semakin banyak

jumlah uang yang beredar menyebabkan nilai uang semakin rendah yang berarti harga-harga akan mengalami peningkatan. Hasil pendugaan menunjukkan jumlah uang beredar signifikan mempengaruhi indeks harga konsumen dalam hubungan yang positif. Berarti makin banyak jumlah uang beredar, maka makin cenderung harga-harga mengalami peningkatan.

Perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar memiliki pengaruh mendorong kenaikan harga-harga. Makin meningkat nilai tukar dolar (menguat) dibanding rupiah (rupiah melemah) akan cenderung menyebabkan harga-harga mengalami peningkatan. Hasil pendugaan pada Tabel 11 menunjukkan nilai tukar signifikan mempengaruhi indeks harga konsumen dalam arah yang positif. Makin tinggi nilai tukar dolar menyebabkan makin meningkat harga-harga dalam perekonomian.

Hasil analisis elastisitas masing-masing peubah pada Tabel 11 menunjukkan peubah jumlah uang beredar memiliki nilai elastisitas 0.13 dalam jangka pendek dan 0.16 dalam jangka panjang. Nilai elastisitas ini bersifat inelastis yaitu peningkatan jumlah uang beredar sebesar 10 % hanya akan menyebabkan indeks harga konsumen naik sebesar 1.3 % dalam jangka pendek dan sebesar 1.6 % dalam jangka panjang. Ini memberikan indikasi bahwa kenaikan jumlah uang beredar tidak memberikan pengaruh kuat mendorong kenaikan harga-harga.

Nilai elastisitas peubah nilai tukar adalah sebesar 0.09 dalam jangka pendek, dan 0.11 dalam jangka panjang dimana nilai elastisitas tersebut bersifat inelastis. Ini memberikan indikasi bahwa baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang tidak terdapat kecenderungan harga-harga mengalami peningkatan yang drastis sebagai akibat perubahan pada nilai tukar. Oleh karena itu sesuai hasil estimasi di atas diketahui bahwa secara umum harga-harga di Provinsi Jawa Tengah tidak mengalami fluktuasi yang tajam dari waktu ke waktu bilamana terjadi perubahan baik pada jumlah beredar maupun pada perubahan nilai tukar. Dengan kata lain perubahan harga-harga di Provinsi Jawa Tengah cenderung stabil atau tidak banyak mengalami perubahan.

4.2.2.7. Jumlah Unit Usaha

Hasil pendugaan persamaan jumlah unit usaha disajikan pada Tabel 12.

Tabel 12. Hasil Pendugaan Parameter Peubah Jumlah Unit Usaha (USHA)

Peubah yang Dijelaskan dan Penjelas	Parameter Dugaan	Prob. T	Taraf nyata	Elastisitas	
				Jangka Pendek	Jangka Panjang
Jumlah Unit Usaha (USHA)					
Intercept	-0.0767				
Penanaman Modal DN (PMDN)	0.000000183	0.1028	C	0.07	0.09
Laju Jumlah Uang Beredar (RMS)	0.1625	0.0020	A	0.08	0.10
Laju PDRB (RPDRB)	4.4758	0.1541	D	0.68	0.83
Lag Jumlah Unit Usaha (LUSHA)	0.1752	0.0723	B	0.17	0.21
Prob. F = 0.0467	R-Sq = 0.3010	Adj R-Sq = 0.1935		DW = 2.465	

Keterangan :

- A = Berpengaruh nyata pada taraf $\alpha = 1 - 5 \%$
- B = Berpengaruh nyata pada taraf $\alpha = 6 - 10 \%$
- C = Berpengaruh nyata pada taraf $\alpha = 11 - 15 \%$
- D = Berpengaruh nyata pada taraf $\alpha = 16 - 20 \%$.

Hasil pendugaan pada Tabel 12 menunjukkan nilai Koefisien Determinasi (R^2), uji F dan uji t yang diperoleh menurut kriteria statistik adalah baik. Jumlah unit usaha signifikan dipengaruhi oleh penanaman modal Dalam Negeri dalam hubungan yang positif. Makin tinggi penanaman modal Dalam Negeri berpengaruh makin meningkatkan jumlah unit usaha di Provinsi Jawa Tengah. Jumlah unit usaha adalah merupakan dari kegiatan ekonomi atau unit produksi yang merupakan sumber dari produksi barang dan jasa dalam perekonomian. Makin bertumbuh kegiatan ekonomi dalam masyarakat ditentukan oleh seberapa banyak investasi dilakukan oleh para pebisnis. Bila kondisi ekonomi memungkinkan, para investor cenderung berinvestasi sehingga kegiatan fisik ekonomi makin bertambah jumlahnya.

Jumlah uang beredar adalah salah satu instrumen pendorong tumbuhnya berbagai kegiatan ekonomi di masyarakat. Sesuai hasil pendugaan pada Tabel 12 di atas, jumlah unit usaha signifikan dipengaruhi oleh jumlah uang beredar dalam hubungan yang positif. Makin banyak jumlah uang yang beredar dalam masyarakat, makin bertambah banyak jumlah unit usaha yang dibangun dalam perekonomian. Dorongan makin bertumbuh jumlah kegiatan ekonomi dalam masyarakat juga sering tergantung pada kondisi ekonomi keseluruhan di masyarakat. Kondisi ekonomi wilayah yang makin membaik, ditandai dengan makin tingginya pencapaian nilai Produk Domestik Regional Bruto sehingga memberikan implikasi yang luas kepada setiap pelaku ekonomi untuk mengambil keputusan ekspansi dalam kegiatannya masing-masing. Hasil pendugaan menunjukkan

jumlah uang unit usaha signifikan dipengaruhi oleh laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto dalam hubungan yang positif. Makin tinggi laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh makin meningkatkan jumlah unit usaha/kegiatan ekonomi yang tercipta dalam masyarakat di Provinsi Jawa Tengah.

Hasil analisis elastisitas masing-masing peubah pada Tabel 12 menunjukkan peubah penanaman modal Dalam Negeri memiliki nilai elastisitas 0.07 dalam jangka pendek dan 0.09 dalam jangka panjang. Nilai elastisitas ini bersifat inelastis yang berarti peningkatan penanaman modal Dalam Negeri tidak efektif meningkatkan jumlah unit usaha/kegiatan ekonomi di masyarakat secara drastis. Berdasarkan nilai, kenaikan penanaman modal Dalam Negeri sebesar 10 % hanya menyebabkan jumlah unit usaha meningkat sebesar 0.7 % dalam jangka pendek, dan sebesar 0.9 % dalam jangka panjang. Hasil analisis ini memberi petunjuk bahwa tidak ada kecenderungan kenaikan yang besar pada jumlah unit usaha ketika jumlah penanaman modal Dalam Negeri bertambah. Ini berarti kegiatan ekonomi di masyarakat atau keadaan dimana para pelaku usaha mulai bangkit dan mendirikan berbagai kegiatan ekonomi baru atau memperluas kegiatan fisik ekonomi yang sudah ada tidak terlampau bergeming bilamana nilai penanaman modal Dalam Negeri meningkat dengan cepat.

Aspek lain yang potensial mendorong bangkitnya jumlah kegiatan ekonomi adalah jumlah uang beredar. Sesuai hasil pendugaan pada Tabel 12 nilai elastisitas dari laju jumlah uang beredar sebesar 0.08 dalam jangka pendek dan 0.10 dalam jangka panjang atau bersifat inelastis. Laju atau pertumbuhan jumlah uang beredar hingga mencapai sebesar 10 % hanya akan meningkatkan jumlah unit usaha/kegiatan ekonomi masyarakat sebesar 0.8 % dalam jangka pendek dan 1.0 % dalam jangka panjang. Ini berarti dalam jangka pendek maupun jangka panjang, laju pertumbuhan jumlah uang beredar tidak efektif meningkatkan jumlah unit usaha di masyarakat.

Perkembangan kondisi ekonomi wilayah menjadi faktor penarik lainnya untuk bertumbuh kegiatan-kegiatan ekonomi baru di wilayah. Hasil pendugaan pada Tabel 12 menunjukkan nilai elastisitas peubah laju Produk Domestik Regional Bruto sebesar 0.68 dalam jangka pendek dan 0.83 dalam jangka panjang. Nilai elastisitas ini masih bersifat inelastis baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, namun dapat dibedakan dengan nilai elastisitas dari peubah penanaman modal Dalam Negeri dan peubah laju jumlah uang beredar. Peubah-peubah penanaman modal Dalam Negeri dan laju jumlah uang beredar merupakan peubah utama yang dianggap mampu menggerakkan tumbuhnya kegiatan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Namun hasil analisis menunjukkan justru

peubah kondisi ekonomi wilayah yang makin membaiklah yang memberi pengaruh positif bagi tumbuhnya kegiatan-kegiatan ekonomi baru dan ekspansi pada kegiatan-kegiatan ekonomi yang sudah ada dalam skala atau ukurannya. Keadaan ekonomi yang membaik ditunjukkan oleh peubah laju atau pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto. Bila laju atau pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto mencapai 10 %, akan mendorong pertumbuhan kegiatan-kegiatan ekonomi baru dan ekspansi pada kegiatan ekonomi yang sudah ada sebesar 6.8 % dalam jangka pendek dan 8.3 % dalam jangka panjang.

4.2.2.8. Penyerapan Tenaga Kerja

Hasil pendugaan persamaan penyerapan tenaga kerja disajikan pada Tabel 13. Nilai Koefisien Determinasi (R^2), uji F dan uji t yang diperoleh dari hasil pendugaan tersebut menurut kriteria statistik adalah baik. Jumlah penyerapan tenaga kerja signifikan dipengaruhi oleh upah rata-rata provinsi dalam hubungan yang negatif. Makin tinggi upah rata-rata provinsi berpengaruh makin menurunkan jumlah penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah. Nilai upah provinsi per tenaga kerja yang digunakan dalam riset ini adalah bukan upah minimum yang ditetapkan pemerintah daerah sesuai peraturan yang berlaku tetapi upah rata-rata yang dibayarkan per tenaga kerja pada berbagai perusahaan dan unit kegiatan produksi di Wilayah Jawa Tengah. Oleh karena itu tingkat upah rata-rata ini mewakili kondisi riil pengupahan di lapangan kerja di Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 13. Hasil Pendugaan Parameter Peubah Penyerapan Tenaga Kerja (TK)

Peubah yang Dijelaskan dan Penjelas	Parameter Dugaan	Prob. T	Taraf nyata	Elastisitas	
				Jangka Pendek	Jangka Panjang
Penyerapan Tenaga Kerja (TK)					
Intercept	-5118765.0				
Upah Rata-rata Provinsi (UMP)	-368.9521	0.1325	C	-0.02	-0.04
Jumlah Unit Usaha (USHA)	13786.0	0.1357	C	0.01	0.02
Jumlah Populasi (POP)	0.3820	0.0070	A	0.83	1.89
Lag Penyerapan TK (LTK)	0.5599	0.0004	A	0.55	1.25
Prob. F = 0.0001	R-Sq = 0.9638	Adj R-Sq = 0.9582		DW = 2.410	

Keterangan :

- A = Berpengaruh nyata pada taraf $\alpha = 1 - 5 \%$
- C = Berpengaruh nyata pada taraf $\alpha = 11 - 15 \%$.

Dalam hubungan dengan penyerapan tenaga kerja, jumlah unit usaha merupakan lapangan pekerjaan yang siap menampung sejumlah besar tenaga kerja yang bekerja dan mencari pekerjaan. Jumlah penyerapan tenaga kerja signifikan dipengaruhi oleh jumlah unit usaha/lapangan pekerjaan yang tersedia dalam hubungan yang positif. Makin

bertambah banyak jumlah unit usaha/lapangan pekerjaan, makin bertambah banyak jumlah tenaga kerja yang terserap di berbagai lapangan pekerjaan.

Peubah yang umumnya menunjukkan hubungan dengan jumlah penyerapan tenaga kerja adalah jumlah penduduk/populasi. Secara alami makin tinggi jumlah penduduk maka makin banyak tersedia jumlah orang yang akan memasuki lapangan pekerjaan. Sesuai hasil pendugaan pada Tabel 13 di atas, jumlah penyerapan tenaga kerja signifikan dipengaruhi oleh jumlah penduduk/populasi di Provinsi Jawa Tengah dalam hubungan yang positif. Makin banyak jumlah penduduk, makin terbuka peluang dan bertambah banyak jumlah tenaga kerja yang terserap di berbagai lapangan pekerjaan.

Hasil analisis elastisitas masing-masing peubah pada Tabel 13 menunjukkan peubah upah rata-rata provinsi memiliki nilai elastisitas sebesar -0.02 dalam jangka pendek dan -0.04 dalam jangka panjang. Nilai elastisitas ini bersifat inelastis yang berarti pergerakan upah rata-rata provinsi yang makin meningkat tidak efektif menyebabkan penurunan yang drastis pada penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah. Sesuai nilai elastisitas, pergerakan upah rata-rata yang makin meningkat sebesar 10 % hanya dapat menyebabkan jumlah penyerapan tenaga kerja berkurang sangat kecil yaitu sebesar 0.2 % dalam jangka pendek dan sebesar 0.4 % dalam jangka panjang. Hasil ini menunjukkan bahwa sesungguhnya fakta penurunan penyerapan tenaga kerja adalah sangat kecil ketika upah rata-rata provinsi makin bergerak naik. Hasil ini diperkuat dengan data dimana riset ini menggunakan data upah rata-rata di berbagai perusahaan dan lapangan kerja dimana upah rata-rata tersebut adalah tingkat upah yang sudah dibayarkan secara riil oleh berbagai perusahaan dan lapangan kerja kepada setiap tenaga kerja yang dipekerjakan. Tingkat upah rata-rata ini jauh lebih tinggi dari tingkat Upah Minimum Regional (UMR) atau Upah Minimum Provinsi (UMP) yang diberlakukan oleh Pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu bilamana tingkat upah rata-rata ini makin naik dan hanya menyebabkan penyerapan tenaga kerja berkurang dalam jumlah yang kecil (0.2 % dan 0.4 %) maka dapat dikatakan bahwa kenaikan upah tidak berpengaruh signifikan menurunkan secara drastis penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah.

Nilai elastisitas pada Tabel 13 menunjukkan peubah jumlah unit usaha memiliki nilai elastisitas sebesar 0.01 dalam jangka pendek dan 0.02 dalam jangka panjang. Nilai elastisitas ini bersifat inelastis yang berarti penambahan jumlah unit usaha/lapangan pekerjaan tidak efektif juga untuk membuka peluang bagi penyerapan tenaga kerja yang lebih banyak di Provinsi Jawa Tengah. Sesuai nilai elastisitas, jika jumlah unit usaha meningkat sebesar 10 %, hanya dapat menyebabkan jumlah penyerapan tenaga kerja

meningkat dalam jumlah sangat kecil yaitu sebesar 0.1 % dalam jangka pendek dan sebesar 0.2 % dalam jangka panjang. Hasil ini menunjukkan bahwa sesungguhnya tidak ada peningkatan yang signifikan pada penyerapan tenaga kerja ketika jumlah unit usaha bertambah. Oleh karena faktor penyebab fluktuasi pada penyerapan tenaga kerja yaitu oleh perubahan upah rata-rata maupun penambahan jumlah unit usaha tidak memberikan pengaruh yang signifikan maka dapat dikatakan Provinsi Jawa Tengah tidak mengalami potensi perubahan penyerapan tenaga kerja yang berarti atau penyerapan tenaga kerja berlangsung dalam kondisi stabil atau alamiah. Hal ini dapat dilihat dari nilai elastisitas peubah jumlah populasi yang lebih besar 0.83 dalam jangka pendek dan 1.89 dalam jangka panjang. Ini berarti perubahan penyerapan tenaga kerja hanya semata-mata lebih cenderung ditentukan oleh penambahan jumlah populasi dan bukan oleh faktor teknis seperti perubahan upah dan jumlah lapangan kerja.

4.2.2.9. Produk Domestik Regional Bruto

Hasil pendugaan persamaan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) disajikan pada Tabel 14.

Tabel 14. Hasil Pendugaan Parameter Peubah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Peubah yang Dijelaskan dan Penjelasan	Parameter Dugaan	Prob. T	Taraf nyata	Elastisitas	
				Jangka Pendek	Jangka Panjang
Produk Dom. Reg. Bruto (PDRB)					
Intercept	-4387199.00				
Penanaman Modal DN (PMDN)	0.0806	0.0595	B	0.01	0.04
Penyerapan Tenaga Kerja (TK)	0.5975	0.0023	A	0.49	1.62
Pengeluaran Pemerintah (EGOV)	0.7832	0.0001	A	0.08	0.27
Jumlah Unit Usaha (USHA)	40357.00	0.1313	C	0.02	0.06
Lag PDRB (LPDRB)	0.6949	0.0001	A	0.66	2.16
Prob. F = 0.0001	R-Sq = 0.9956	Adj R-Sq = 0.9947		DW = 2.103	

Keterangan :

- A = Berpengaruh nyata pada taraf $\alpha = 1 - 5\%$
- B = Berpengaruh nyata pada taraf $\alpha = 6 - 10\%$
- C = Berpengaruh nyata pada taraf $\alpha = 11 - 15\%$.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator makro regional yang menunjukkan seberapa besar nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu wilayah pada periode waktu tertentu. Oleh karena itu peubah PDRB dapat menunjukkan tentang perkembangan perekonomian wilayah. Dalam hubungan dengan fungsi-fungsi

pajak yang dianalisis, efek akhir dari bagaimana pengaturan pajak sesuai fungsinya masing-masing, akan bermuara dan berkontribusi pada perkembangan perekonomian wilayah. Dalam hal ini maka perlu juga menduga peubah PDRB.

Hasil pendugaan pada Tabel 14 menunjukkan nilai Koefisien Determinasi (R^2), uji F dan uji t yang diperoleh menurut kriteria statistik adalah baik. Produk Domestik Regional Bruto signifikan dipengaruhi oleh penanaman modal Dalam Negeri dalam hubungan yang positif. Makin tinggi penanaman modal Dalam Negeri berpengaruh meningkatkan PDRB. Begitu juga peubah penyerapan tenaga kerja signifikan mempengaruhi PDRB dalam hubungan yang positif. Baik penanaman modal Dalam Negeri maupun penyerapan tenaga kerja, keduanya merupakan faktor input wilayah yang digunakan untuk menghasilkan produksi wilayah (PDRB). Dalam konteks wilayah, investasi seharusnya sebagai investasi total wilayah yang merupakan penjumlahan dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Namun hasil evaluasi pada tahap pendugaan memberikan hasil bahwa peubah PMA maupun total investasi wilayah (INVD) tidak memenuhi baik kriteria ekonomi maupun kriteria statistik yang disyaratkan. Dengan demikian kedua peubah tersebut dikeluarkan dari persamaan PDRB dan diganti dengan PMDN yang lebih memenuhi baik kriteria ekonomi maupun statistik yang disyaratkan. Salah satu peubah yang mewakili investasi dalam hubungan output dan input wilayah dalam bentuk fisik adalah jumlah unit usaha. Peubah ini sebenarnya merupakan investasi dalam bentuk fisik. Oleh karena itu di dalam hasil pendugaan terlihat bahwa jumlah unit usaha signifikan mempengaruhi PDRB dalam hubungan yang positif. Makin banyak unit usaha/kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat, makin tinggi nilai dari produk barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian (PDRB).

Pengeluaran pemerintah merupakan instrumen kebijakan fiskal dalam menggiring perekonomian ke arah yang dikehendaki. Oleh karena itu pengeluaran pemerintah turut dimasukkan ke dalam persamaan PDRB. Hasil pendugaan menunjukkan pengeluaran pemerintah signifikan mempengaruhi PDRB dalam hubungan yang positif. Makin tinggi pengeluaran pemerintah daerah berpengaruh makin meningkatkan nilai PDRB yang dicapai.

Hasil analisis elastisitas masing-masing peubah pada Tabel 14 menunjukkan peubah penanaman modal Dalam Negeri memiliki nilai elastisitas sangat kecil 0.01 dalam jangka pendek dan 0.04 dalam jangka panjang. Nilai elastisitas bersifat inelastis ini bermakna tidak efektif menyebabkan kenaikan pada PDRB. Berdasarkan nilainya, kenaikan penanaman modal Dalam Negeri sebesar 10 % hanya dapat menyebabkan nilai

PDRB meningkat sebesar 0.1 % dalam jangka pendek dan sebesar 0.4 % dalam jangka panjang. Hal yang sama ditunjukkan oleh nilai elastisitas peubah investasi dalam bentuk fisik yaitu jumlah unit usaha sebesar 0.02 dalam jangka pendek dan 0.06 dalam jangka panjang. Berarti kenaikan investasi fisik jumlah unit usaha sebesar 10 % hanya mampu meningkatkan nilai PDRB sebesar 0.2 % dalam jangka pendek dan 0.6 % dalam jangka panjang. Hasil kedua investasi di atas menunjukkan bahwa kecenderungan kenaikan nilai PDRB di Provinsi Jawa Tengah tidak terutama digerakkan oleh gencarnya penanaman investasi dan pertumbuhan unit usaha/kegiatan ekonomi.

Hasil pendugaan yang menjawab hal di atas adalah dominasi penyerapan tenaga kerja. Analisis elastisitas menunjukkan bahwa peubah penyerapan tenaga kerja memiliki nilai elastisitas yang lebih besar yaitu sebesar 0.49 dalam jangka pendek dan 1.62 dalam jangka panjang. Ini berarti dalam jangka pendek, penyerapan tenaga kerja belum memberikan kontribusi cukup besar menaikkan nilai PDRB, namun dalam jangka panjang kontribusi tersebut sangat besar. Kenaikan penyerapan tenaga kerja sebesar 10 % sanggup menaikkan nilai PDRB sebesar 4.9 % dalam jangka pendek dan sebesar 16.4 % dalam jangka panjang. Hasil ini memberi indikasi bahwa pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Tengah sangat dominan ditentukan oleh kontribusi tenaga kerja.

Instrumen kebijakan fiskal yang berperan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah, sesuai elastisitasnya hanya bernilai kecil yaitu 0.08 dalam jangka pendek dan 0.27 dalam jangka panjang. Berarti, kenaikan pengeluaran pemerintah daerah sebesar 10 % hanya mampu meningkatkan nilai PDRB sebesar 0.8 % dalam jangka pendek dan 2.7 % dalam jangka panjang. Ini menunjukkan peran pemerintah daerah dalam menggerakkan perekonomian daerah melalui peran fiskal relatif masih kecil. Sebaliknya perekonomian lebih dominan digerakkan oleh keadaan internal faktor produksi tenaga kerja.

4.3. Validasi Model dan Simulasi

4.3.1. Validasi Model

Validasi model bertujuan mengetahui apakah model yang dihasilkan valid digunakan dalam simulasi. Indikator yang digunakan untuk menilai apakah model valid atau tidak diantaranya adalah *Root Mean Square Error (RMSE)*, *Root Mean Square Percent Error (RMSPE)*, dan *U-Theil (Theil's Inequality Coefficient)*. Nilai-nilai RMSE, RMSPE dan U-Theil yang diharapkan adalah kecil yakni mendekati nol. Hasil validasi model disajikan pada Tabel 15.

Tabel 15. Hasil Validasi Model Fungsi Pajak

Peubah Endogen	Statistik Validasi		
	RMSE	RMSPE	U-Theil
TAX = Penerimaan pajak daerah	0	0	0.0000
REVGGOV = Rencana anggaran pemerintah	150229	17.3149	0.0276
EGOV = Pengeluaran pemerintah	190262	9.2217	0.0400
PMDN = Penanaman Modal Dalam Negeri	1676418	104.6446	0.2481
PMA = Penanaman Modal Asing	5801670	680.0940	0.3768
INVD = Total investasi daerah	6578845	164.2860	0.3205
MS = Jumlah uang beredar	15066289	552.4281	0.0815
IHK = Indeks Harga Konsumen	56.3829	33.1416	0.0969
USHA = Jumlah unit usaha	2.3386	21.7129	0.1666
TK = Jumlah penyerapan tenaga kerja	340169	2.3512	0.0123
PDRB = Produk Domestik Regional Bruto	509208	3.3751	0.0142

Sesuai hasil validasi model, kriteria RMSE tidak memenuhi syarat karena nilai RMSE mayoritas peubah endogen > 100 . Kriteria yang memenuhi syarat adalah RMSPE dan U-Theil. Nilai RMSPE dari sebagian besar peubah endogen yaitu sebanyak 63.63 % (7 peubah) bernilai < 100 , dan nilai U-Theil dari 72.73 % peubah endogen sebesar < 0.20 . Menurut Pindyck and Rubinfeld (2008) nilai U-Theil bernilai lebih kecil dari 0.20 menunjukkan model tidak mengalami *bias* sistematis, model secara tepat menggantikan variasi dari variabel dependen, *error* simulasi berfluktuasi karena acak (*random*). Hasil prediksi model di atas telah memenuhi kriteria statistik dimaksud sehingga model dinyatakan valid digunakan dalam simulasi perubahan komponen pajak daerah.

4.3.2. Hasil Simulasi Fungsi Pajak dan Dampak Perubahan

Mengingat fungsi-fungsi yang diibankan oleh pajak begitu besar dan penting sehingga pemerintah melegalkan pajak sebagai tanggungan semua warga Negara. Fungsi pajak secara umum adalah mendukung pembangunan dan fungsi secara khusus adalah sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah. Fungsi khusus tersebut diantaranya sebagai *budgetair* untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara sehingga tugas-tugas rutin Negara dan pembangunan dapat terlaksanakan. Fungsi sebagai “regulated” (fungsi mengatur) untuk menggiring investor Dalam Negeri dan Luar Negeri menanamkan modalnya mendukung pertumbuhan ekonomi. Fungsi *stabilisasi* untuk menjaga stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Fungsi “distribusi” untuk membiayai kegiatan pembangunan sehingga tercipta kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Hasil-hasil simulasi berikut ini akan memperlihatkan seberapa besar masing-masing fungsi pajak tercipta atau bertumbuh dalam realitas. Simulasi dilakukan terhadap masing-masing komponen pajak daerah yaitu pajak kendaraan bermotor, pajak bea balik

nama kendaraan bermotor, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor serta total pajak daerah atau kombinasi ketiga jenis pajak. Besaran simulasi yang dilakukan sebesar 20 % berdasarkan ketentuan umum bahwa target pencapaian penerimaan pajak setiap tahun dapat mencapai hingga 20 % dan lebih.

4.3.2.1. Peningkatan Nilai Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil simulasi peningkatan nilai pajak kendaraan bermotor (PKB) sebesar 20 % disajikan pada Tabel 16. Peningkatan nilai pajak kendaraan bermotor sebesar 20 % berdampak meningkatkan nilai penerimaan pajak daerah (pertumbuhan) sebesar Rp. 73348 juta atau sebesar 7.97 %. Dampak pertumbuhan nilai penerimaan pajak daerah ini melalui fungsi *budgeter* meningkatkan rencana penerimaan pemerintah daerah sebesar Rp. 43262 juta atau 2.23 %. Dampak lanjutan dari pertumbuhan rencana penerimaan pemerintah daerah adalah pada pengeluaran pemerintah dimana pengeluaran pemerintah dapat bertumbuh sebesar Rp. 26682 juta atau 1.56 %. Sesuai hasil simulasi ini berarti pada fungsi *budgeter* pajak, peningkatan pajak kendaraan bermotor berdampak menciptakan pertumbuhan fungsi *budgetair* pajak total sebesar 3.79 %.

Tabel 16. Hasil Simulasi Dampak Peningkatan Nilai Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Sebesar 20 %

Peubah Endogen	Pertumbuhan	
	Nilai	%
TAX = Penerimaan pajak daerah (juta Rp)	73348	7.97
REVGGOV = Rencana anggaran pemerintah (juta Rp)	43262	2.23
EGOV = Pengeluaran pemerintah (juta Rp)	26682	1.56
PMDN = Penanaman Modal Dalam Negeri (juta Rp)	53656	1.00
PMA = Penanaman Modal Asing (juta Rp)	101499	1.08
INVD = Total investasi daerah (juta Rp)	155154	1.05
MS = Jumlah uang beredar (juta Rp)	440230	0.79
IHK = Indeks Harga Konsumen (indeks)	0.28	0.10
USHA = Jumlah unit usaha (juta unit)	0.02	0.25
TK = Jumlah penyerapan tenaga kerja (orang)	240	0.0018
PDRB = Produk Domestik Regional Bruto (juta Rp)	26066	0.16

Pada penanaman modal Dalam Negeri dan penanaman modal Asing, dampak pertumbuhan fungsi pajak melalui fungsi *budgeter* seterusnya melalui pengeluaran pemerintah daerah berdampak menggiring investor menanamkan modal di Provinsi Jawa Tengah. Akibatnya penanaman modal Dalam Negeri dan penanaman modal Asing bertumbuh masing-masing sebesar Rp. 53656 juta (1.0 %) dan Rp. 101499 juta (1.08 %) serta total investasi daerah bertumbuh sebesar Rp. 155154 juta atau 1.05 %. Sesuai hasil simulasi ini diperoleh fungsi *regulated* pajak bertumbuh sebesar 2.08 %.

Fungsi *stabilisasi* pajak bertujuan menjaga stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Stabilisasi perekonomian dapat terjadi melalui pengendalian jumlah uang beredar yang kemudian berlanjut pada harga-harga yang stabil (inflasi terkendali). Fungsi ini mengalir melalui pengaturan anggaran pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu dampak lanjutan dari peningkatan pajak kendaraan bermotor 20 % diatas adalah berdampak meningkatkan jumlah uang beredar sebesar Rp. 440230 juta atau 0.79 %. Dampak akibat pertumbuhan jumlah uang beredar adalah akan mengakibatkan harga-harga mengalami pertumbuhan sebesar 0.28 indeks atau sebesar 0.10 %. Sesuai hasil simulasi ini diperoleh fungsi *stabilisasi* pajak bertumbuh sebesar 0.89 %.

Sesuai fungsi *distribusi* yaitu untuk menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat maka dampak lanjutan dari peningkatan pajak kendaraan bermotor 20 % pada kesempatan kerja adalah meningkatkan jumlah unit usaha sebanyak 0.02 juta unit atau 0.25 %. Seterusnya dampak pada penyerapan tenaga kerja adalah bertumbuh sebesar 240 orang atau 0.0018 %. Sesuai hasil simulasi ini diperoleh fungsi *distribusi* pajak bertumbuh sebesar 0.252 %. Dampak akhir dari peningkatan pajak kendaraan 20 % adalah tercermin pada pertumbuhan ekonomi wilayah yang diukur dari indikator pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto. Produk Domestik Regional Bruto bertumbuh sebesar Rp. 26066 juta atau sebesar 0.16 %.

Berdasarkan nilai-nilai pertumbuhan yang diperoleh di atas sebagai dampak dari peningkatan pajak kendaraan bermotor 20 %, dapat dilihat bahwa total penerimaan pajak meningkat cukup besar 7.97 %. Ini diikuti dengan pertumbuhan fungsi *budgetair* pajak sebesar 3.79 % yang merupakan penjumlahan dari pertumbuhan penerimaan pemerintah (2.23 %) dan pengeluaran pemerintah (1.56 %). Meskipun peningkatan pajak kendaraan bermotor hanya baru sebagian komponen dari total pajak daerah, tetapi sudah terlihat bahwa peningkatan komponen pajak tersebut memberikan dukungan pertumbuhan bagi anggaran pemerintah daerah baik penerimaan maupun pengeluaran. Namun demikian dari nilai persentase pertumbuhan anggaran yang ada, diketahui bahwa anggaran tersebut masih bertumbuh dalam nilai yang relatif kecil, yang mengindikasikan bahwa fungsi *budgetair* pajak relatif masih kecil wujud dalam pelaksanaannya. Bila dikaitkan dengan fungsinya yaitu untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara sehingga tugas-tugas rutin Negara dan pembangunan dapat terlaksanakan, maka pertumbuhan anggaran yang kecil sudah tentu memiliki kemampuan yang juga kecil dalam membiayai pembangunan. Dengan kata lain, ekspansi pembangunan belum dapat terlaksana dengan penuh akibat pertumbuhan anggaran yang kecil.

Dampak peningkatan pajak kendaraan bermotor 20 % mengakibatkan terjadi pertumbuhan fungsi *regulated* pajak sebesar 2.08 % yang merupakan penjumlahan dari pertumbuhan penanaman modal Dalam Negeri (1.0 %) dan penanaman modal Asing (1.08 %). Pertumbuhan penanaman investasi di Provinsi Jawa Tengah lebih dimungkinkan oleh pertumbuhan pengeluaran pemerintah yang memberi peluang bagi investor mengembangkan investasinya dalam membangun kegiatan bisnis. Nilai pertumbuhan investasi yang diperoleh baru mencapai 2.08 % menunjukkan bahwa fungsi *regulated* pajak masih relatif kecil tercipta dalam perekonomian Provinsi Jawa Tengah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Dampak peningkatan pajak kendaraan bermotor 20 % mengakibatkan terjadi pertumbuhan fungsi *stabilisasi* pajak sebesar 0.89 % yang merupakan penjumlahan dari pertumbuhan jumlah uang beredar (0.79 %) dan indeks harga konsumen sebagai indikator kenaikan harga-harga atau inflasi (0.10 %). Pengertian *stabilisasi* menunjukkan keadaan perekonomian yang tidak mengalami fluktuasi besar atau gejolak. Keadaan ini ditandai dengan pertumbuhan inflasi yang stabil yang didukung oleh pertumbuhan jumlah uang beredar yang stabil. Kondisi dimana jumlah uang beredar bertumbuh cepat akan berdampak pada kecenderungan harga-harga meningkat dengan cepat (inflasi). Sesuai pengertian ini maka yang diharapkan dari fungsi *stabilisasi* pajak adalah dicapai angka pertumbuhan jumlah uang beredar yang kecil disertai laju inflasi yang rendah. Oleh karena itu hasil simulasi fungsi *stabilisasi* pajak sebesar 0.89 % memberi indikasi fungsi *stabilisasi* pajak menjadi wujud dalam pelaksanaannya. Meskipun demikian fungsi yang tercipta ini baru diperoleh dari simulasi salah satu komponen/jenis pajak dari total pajak daerah yang ada.

Dampak peningkatan pajak kendaraan bermotor 20 % mengakibatkan terjadi pertumbuhan fungsi *distribusi* pajak sebesar 0.252 % yang merupakan penjumlahan dari pertumbuhan jumlah unit usaha (0.25 %) dan jumlah penyerapan tenaga kerja (0.0018 %). Dari fungsi *distribusi* pajak yang bertujuan untuk membiayai kegiatan pembangunan sehingga tercipta kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat, maka diperlukan angka pertumbuhan yang besar dari fungsi ini. Pertumbuhan fungsi distribusi yang baru mencapai nilai 0.252 % adalah angka yang terlalu kecil. Oleh karena itu ia mengindikasikan bahwa belum banyak berperan fungsi pajak untuk menciptakan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja dalam perekonomian Provinsi Jawa Tengah. Bilamana fungsi distribusi diteruskan dengan melihat pertumbuhan PDRB maka pertumbuhannya baru mencapai 0.16 %. Angka ini masih relatif kecil dan dapat dikatakan bahwa peran

pajak masih relatif kecil dalam mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Meskipun demikian hasil ini diperoleh dari simulasi hanya satu jenis pajak daerah.

4.3.2.2. Peningkatan Nilai Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Hasil simulasi peningkatan nilai bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sebesar 20 % disajikan pada Tabel 17. Peningkatan nilai bea balik nama kendaraan bermotor sebesar 20 % berdampak meningkatkan nilai penerimaan pajak daerah (pertumbuhan) sebesar Rp. 75006 juta atau 8.15 %. Dampak pertumbuhan nilai penerimaan pajak daerah ini melalui fungsi *budgeter* meningkatkan rencana penerimaan pemerintah daerah sebesar Rp. 44242 juta atau 2.28 %. Dampak lanjutannya adalah berhubungan dengan pengeluaran pemerintah dimana pengeluaran pemerintah dapat bertumbuh sebesar Rp. 27287 juta atau 1.59 %. Sesuai hasil simulasi ini, peningkatan bea balik nama kendaraan bermotor berdampak menciptakan pertumbuhan fungsi *budgeter* pajak sebesar 3.87 %.

Tabel 17. Hasil Simulasi Dampak Peningkatan Nilai Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Sebesar 20 %

Peubah Endogen	Pertumbuhan	
	Nilai	%
TAX = Penerimaan pajak daerah (juta Rp)	75006	8.15
REVGGOV = Rencana anggaran pemerintah (juta Rp)	44242	2.28
EGOV = Pengeluaran pemerintah (juta Rp)	27287	1.59
PMDN = Penanaman Modal Dalam Negeri (juta Rp)	54871	1.02
PMA = Penanaman Modal Asing (juta Rp)	103798	1.11
INVD = Total investasi daerah (juta Rp)	158669	1.08
MS = Jumlah uang beredar (juta Rp)	450203	0.80
IHK = Indeks Harga Konsumen (indeks)	0.28	0.10
USHA = Jumlah unit usaha (juta unit)	0.02	0.26
TK = Jumlah penyerapan tenaga kerja (orang)	254	0.0019
PDRB = Produk Domestik Regional Bruto (juta Rp)	26686	0.16

Pada penanaman modal Dalam Negeri dan penanaman modal Asing, dampak pertumbuhan fungsi pajak melalui fungsi *budgeter* seterusnya melalui pengeluaran pemerintah daerah berdampak menggiring investor menanamkan modal di Provinsi Jawa Tengah. Akibatnya penanaman modal Dalam Negeri dan penanaman modal Asing bertumbuh masing-masing sebesar Rp. 54871 juta (1.02 %) dan Rp. 103798 juta (1.11 %) serta total investasi daerah bertumbuh sebesar Rp. 158669 juta atau 1.08 %. Sesuai hasil simulasi ini diperoleh fungsi *regulated* pajak bertumbuh sebesar 2.13 %.

Dampak lanjutan dari peningkatan bea balik nama kendaraan bermotor adalah meningkatkan jumlah uang beredar sebesar Rp. 450203 juta atau 0.80 %. Pertumbuhan

jumlah uang beredar akan mengakibatkan harga-harga bertumbuh sebesar 0.28 indeks atau 0.10 %. Hasil ini menunjukkan fungsi *stabilisasi* pajak bertumbuh sebesar 0.90 %.

Dampak lanjutan dari peningkatan bea balik nama kendaraan bermotor 20 % pada kesempatan kerja adalah meningkatkan jumlah unit usaha sebanyak 0.02 juta unit atau 0.26 %. Dampak lanjutan pada penyerapan tenaga kerja adalah bertumbuh sebesar 254 orang atau 0.0019 %. Sesuai hasil simulasi ini diperoleh fungsi *distribusi* pajak bertumbuh sebesar 0.262 %. Dampak akhir dari peningkatan bea balik nama kendaraan bermotor 20 % adalah Produk Domestik Regional Bruto bertumbuh sebesar Rp. 26686 juta atau 0.16 %.

Sesuai nilai-nilai pertumbuhan di atas dapat dilihat bahwa total penerimaan pajak meningkat cukup besar 8.15 %. Ini diikuti dengan pertumbuhan fungsi *budgetair* pajak sebesar 3.87 % yang merupakan penjumlahan dari pertumbuhan penerimaan pemerintah (2.28 %) dan pengeluaran pemerintah (1.59 %). Peningkatan komponen pajak bea balik nama kendaraan bermotor memberikan dukungan pertumbuhan bagi anggaran pemerintah daerah baik penerimaan maupun pengeluaran. Namun sesuai nilai persentase pertumbuhan anggaran tersebut, diketahui masih bertumbuh dalam nilai yang relatif kecil. Ini mengindikasikan bahwa fungsi *budgetair* pajak relatif masih kecil wujud dalam pelaksanaannya. Berarti sesuai fungsinya yaitu untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara sehingga tugas-tugas rutin Negara dan pembangunan dapat terlaksanakan, pertumbuhan anggaran yang kecil akan memiliki kemampuan yang juga kecil dalam membiayai pembangunan. Oleh karena itu ekspansi pembangunan belum dapat terlaksana dengan penuh akibat pertumbuhan anggaran yang kecil.

Dampak peningkatan bea balik nama kendaraan bermotor 20 % mengakibatkan terjadi pertumbuhan fungsi *regulated* pajak sebesar 2.13 % yang merupakan penjumlahan dari pertumbuhan penanaman modal Dalam Negeri (1.02 %) dan penanaman modal Asing (1.11 %). Pertumbuhan penanaman investasi di Provinsi Jawa Tengah lebih dimungkinkan oleh pertumbuhan pengeluaran pemerintah yang memberi peluang bagi investor mengembangkan investasinya dalam membangun kegiatan bisnis. Nilai pertumbuhan investasi yang diperoleh baru mencapai 2.13 % menunjukkan bahwa fungsi *regulated* pajak masih relatif kecil tercipta dalam perekonomian Provinsi Jawa Tengah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Dampak peningkatan bea balik nama kendaraan bermotor 20 % mengakibatkan terjadi pertumbuhan fungsi *stabilisasi* pajak sebesar 0.90 % yang merupakan penjumlahan dari pertumbuhan jumlah uang beredar (0.80 %) dan indeks harga konsumen sebagai indikator kenaikan harga-harga atau inflasi (0.10 %). Sesuai pengertian *stabilisasi* pajak

yang menunjukkan keadaan perekonomian tidak mengalami fluktuasi besar maka diharapkan nilai fungsi *stabilisasi* pajak adalah kecil yang ditandai oleh laju pertumbuhan jumlah uang beredar yang kecil disertai laju inflasi yang rendah. Hasil simulasi fungsi *stabilisasi* pajak sebesar 0.90 % memberi indikasi fungsi *stabilisasi* pajak menjadi wujud dalam pelaksanaannya jika oleh simulasi manual komponen/jenis pajak bea balik nama kendaraan bermotor.

Dampak peningkatan bea balik nama kendaraan bermotor 20 % mengakibatkan terjadi pertumbuhan fungsi *distribusi* pajak sebesar 0.262 % yang merupakan penjumlahan dari pertumbuhan jumlah unit usaha (0.26 %) dan jumlah penyerapan tenaga kerja (0.0019 %). Angka pertumbuhan yang diharapkan dari fungsi distribusi ini harus besar, yang menunjukkan bahwa fungsi pajak untuk mendistribusikan lapangan pekerjaan bagi berbagai kelompok masyarakat dapat terlaksana. Pertumbuhan fungsi distribusi yang baru mencapai nilai 0.262 % adalah angka yang kecil sehingga baru mengindikasikan bahwa belum banyak berperan fungsi pajak untuk menciptakan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja dalam perekonomian Provinsi Jawa Tengah. Terkait fungsi distribusi untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi wilayah, maka pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto baru mencapai 0.16 %. Angka yang kecil ini mengindikasikan peran pajak masih relatif kecil mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah.

4.3.2.3. Peningkatan Nilai Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Hasil simulasi peningkatan nilai pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar 20 % disajikan pada Tabel 18.

Tabel 18. Hasil Simulasi Dampak Peningkatan Nilai Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Sebesar 20 %

Peubah Endogen	Pertumbuhan	
	Nilai	%
TAX = Penerimaan pajak daerah (juta Rp)	35683	3.88
REVGGOV = Rencana anggaran pemerintah (juta Rp)	21045	1.09
EGOV = Pengeluaran pemerintah (juta Rp)	12979	0.76
PMDN = Penanaman Modal Dalam Negeri (juta Rp)	26100	0.49
PMA = Penanaman Modal Asing (juta Rp)	49373	0.53
INVD = Total investasi daerah (juta Rp)	75473	0.51
MS = Jumlah uang beredar (juta Rp)	214145	0.38
IHK = Indeks Harga Konsumen (indeks)	0.14	0.05
USHA = Jumlah unit usaha (juta unit)	0.01	0.11
TK = Jumlah penyerapan tenaga kerja (orang)	104	0.0008
PDRB = Produk Domestik Regional Bruto (juta Rp)	12635	0.08

Peningkatan nilai pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar 20 % berdampak meningkatkan nilai penerimaan pajak daerah (pertumbuhan) sebesar Rp. 35683 juta atau sebesar 3.88 %. Dampak pertumbuhan nilai penerimaan pajak daerah ini melalui fungsi *budgeter* meningkatkan rencana penerimaan pemerintah daerah sebesar Rp. 21045 juta atau 1.09 %. Dampak lanjutan dari pertumbuhan rencana penerimaan pemerintah daerah adalah pada pengeluaran pemerintah dimana pengeluaran pemerintah dapat bertumbuh sebesar Rp. 12979 juta atau 0.76 %. Sesuai hasil simulasi ini, peningkatan bea balik nama kendaraan bermotor berdampak menciptakan pertumbuhan fungsi *budgeter* pajak total sebesar 1.85 %.

Pada penanaman modal Dalam Negeri dan penanaman modal Asing, dampak pertumbuhan fungsi pajak melalui fungsi *budgeter* seterusnya melalui pengeluaran pemerintah daerah berdampak menggiring investor menanamkan modal di Provinsi Jawa Tengah. Akibatnya penanaman modal Dalam Negeri dan penanaman modal Asing bertumbuh masing-masing sebesar Rp. 26100 juta (0.49 %) dan Rp. 49373 juta (0.53 %) serta total investasi daerah bertumbuh sebesar Rp. 75473 juta atau 0.51 %. Sesuai hasil simulasi ini diperoleh fungsi *regulated* pajak bertumbuh sebesar 1.02 %.

Dampak lanjutan dari peningkatan nilai pajak bahan bakar kendaraan bermotor 20 % adalah meningkatkan jumlah uang beredar sebesar Rp. 214145 juta atau 0.38 %. Dampak akibat pertumbuhan jumlah uang beredar adalah akan mengakibatkan harga-harga mengalami pertumbuhan sebesar 0.14 indeks atau sebesar 0.05 %. Sesuai hasil simulasi ini diperoleh fungsi *stabilisasi* pajak bertumbuh sebesar 0.43 %. Dampak lanjutan dari peningkatan nilai pajak bahan bakar kendaraan bermotor 20 % pada kesempatan kerja adalah meningkatkan jumlah unit usaha sebanyak 0.01 juta unit atau 0.11 %. Seterusnya dampak pada penyerapan tenaga kerja adalah bertumbuh sebesar 104 orang atau 0.0008 %. Sesuai hasil simulasi ini diperoleh fungsi *distribusi* pajak bertumbuh sebesar 0.111 %. Dampak akhir dari peningkatan nilai pajak bahan bakar kendaraan bermotor 20 % adalah Produk Domestik Regional Bruto bertumbuh sebesar Rp. 12635 juta atau sebesar 0.08 %.

Sesuai nilai-nilai pertumbuhan di atas dapat dilihat bahwa total penerimaan pajak meningkat cukup kecil sebesar 3.88 %. Ini diikuti dengan pertumbuhan fungsi *budgetair* pajak sebesar 1.85 % yang merupakan penjumlahan dari pertumbuhan penerimaan pemerintah (1.09 %) dan pengeluaran pemerintah (0.76 %). Peningkatan komponen pajak bahan bakar kendaraan bermotor memberikan dukungan pertumbuhan bagi anggaran pemerintah daerah baik penerimaan maupun pengeluaran dalam nilai yang sangat kecil. Ini mengindikasikan bahwa fungsi *budgetair* pajak relatif sangat kecil terwujud dalam

pelaksanaannya. Berarti sesuai fungsinya yaitu untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara sehingga tugas-tugas rutin Negara dan pembangunan dapat terlaksanakan, pertumbuhan anggaran sangat kecil akan memiliki kemampuan yang juga sangat kecil dalam membiayai pembangunan.

Dampak peningkatan pajak bahan bakar kendaraan bermotor 20 % mengakibatkan terjadi pertumbuhan fungsi *regulered* pajak sebesar 1.02 % yang merupakan penjumlahan dari pertumbuhan penanaman modal Dalam Negeri (0.49 %) dan penanaman modal Asing (0.53 %). Pertumbuhan penanaman investasi di Provinsi Jawa Tengah lebih dimungkinkan oleh pertumbuhan pengeluaran pemerintah yang memberi peluang bagi investor mengembangkan investasinya dalam membangun kegiatan bisnis. Nilai pertumbuhan investasi yang diperoleh baru mencapai 1.02 % menunjukkan bahwa fungsi *regulered* pajak masih sangat kecil tercipta dalam perekonomian Provinsi Jawa Tengah.

Dampak peningkatan pajak bahan bakar kendaraan bermotor 20 % mengakibatkan terjadi pertumbuhan fungsi *stabilisasi* pajak sebesar 0.43 % yang merupakan penjumlahan dari pertumbuhan jumlah uang beredar (0.38 %) dan indeks harga konsumen sebagai indikator kenaikan harga-harga atau inflasi (0.05 %). Sesuai pengertian *stabilisasi* pajak maka diharapkan nilai fungsi *stabilisasi* pajak adalah kecil yang ditandai oleh laju pertumbuhan jumlah uang beredar yang kecil disertai laju inflasi yang rendah. Hasil simulasi fungsi *stabilisasi* pajak sebesar 0.43 % memberi indikasi fungsi *stabilisasi* pajak menjadi wujud dalam pelaksanaannya jika oleh simulasi manual komponen/jenis pajak bahan bakar kendaraan bermotor.

Dampak peningkatan pajak bahan bakar kendaraan bermotor 20 % mengakibatkan terjadi pertumbuhan fungsi *distribusi* pajak sebesar 0.111 % yang merupakan penjumlahan dari pertumbuhan jumlah unit usaha (0.11 %) dan jumlah penyerapan tenaga kerja (0.0008 %). Sesuai fungsi distribusi pajak dimana diperlukan pertumbuhan yang besar, maka nilai sebesar 0.111 % adalah angka yang sangat kecil sehingga mengindikasikan bahwa hampir tidak ada peran fungsi pajak untuk menciptakan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja dalam perekonomian Provinsi Jawa Tengah. Terkait fungsi distribusi untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi wilayah, maka pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto baru mencapai 0.08 %. Angka yang sangat kecil ini mengindikasikan peran pajak sangat kecil mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah.

4.3.2.4. Peningkatan Nilai Pajak Daerah

Hasil simulasi peningkatan nilai pajak daerah atau gabungan nilai ketiga jenis pajak (pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor) secara bersama-sama sebesar 20 % disajikan pada Tabel 19. Peningkatan nilai semua komponen pajak secara bersamaan sebesar 20 % berdampak meningkatkan nilai penerimaan pajak daerah (pertumbuhan) sebesar Rp. 184038 juta atau sebesar 20 %. Dampak pertumbuhan nilai penerimaan pajak daerah ini melalui fungsi *budgeter* meningkatkan rencana penerimaan pemerintah daerah sebesar Rp. 108548 juta atau 5.60 %. Dampak lanjutan dari pertumbuhan rencana penerimaan pemerintah daerah adalah pada pengeluaran pemerintah dimana pengeluaran pemerintah dapat bertumbuh sebesar Rp. 66947 juta atau 3.90 %. Sesuai hasil simulasi ini berarti pada fungsi *budgeter* pajak, peningkatan nilai pajak daerah berdampak menciptakan pertumbuhan fungsi *budgeter* pajak total sebesar 9.50 %.

Tabel 19. Hasil Simulasi Dampak Peningkatan Nilai Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Masing-masing Sebesar 20 %

Peubah Endogen	Pertumbuhan	
	Nilai	%
TAX = Penerimaan pajak daerah (juta Rp)	184038	20.00
REVGGOV = Rencana anggaran pemerintah (juta Rp)	108548	5.60
EGOV = Pengeluaran pemerintah (juta Rp)	66947	3.90
PMDN = Penanaman Modal Dalam Negeri (juta Rp)	134627	2.51
PMA = Penanaman Modal Asing (juta Rp)	254670	2.71
INVD = Total investasi daerah (juta Rp)	389297	2.64
MS = Jumlah uang beredar (juta Rp)	1104579	1.97
IHK = Indeks Harga Konsumen (indeks)	0.70	0.25
USHA = Jumlah unit usaha (juta unit)	0.04	0.61
TK = Jumlah penyerapan tenaga kerja (orang)	598	0.00
PDRB = Produk Domestik Regional Bruto (juta Rp)	65387	0.39

Dampak pertumbuhan fungsi pajak melalui fungsi *budgeter* seterusnya melalui pengeluaran pemerintah daerah berdampak menggiring investor menanamkan modal di Provinsi Jawa Tengah. Akibatnya penanaman modal Dalam Negeri dan penanaman modal Asing bertumbuh masing-masing sebesar Rp. 134627 juta (2.51 %) dan Rp. 254670 juta (2.71 %) serta total investasi daerah bertumbuh sebesar Rp. 389297 juta atau 2.64 %. Sesuai hasil simulasi ini diperoleh fungsi *regulated* pajak bertumbuh sebesar 5.22 %.

Fungsi *stabilisasi* pajak bertujuan menjaga stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Fungsi ini mengalir melalui pengaturan anggaran pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu dampak lanjutan dari peningkatan pajak daerah 20 % diatas adalah berdampak meningkatkan jumlah uang beredar sebesar Rp. 1104579 juta atau 1.97 %.

Dampak akibat pertumbuhan jumlah uang beredar adalah akan mengakibatkan harga-harga mengalami pertumbuhan sebesar 0.70 indeks atau sebesar 0.25 %. Sesuai hasil simulasi ini diperoleh fungsi *stabilisasi* pajak bertumbuh sebesar 2.22 %.

Sesuai fungsi *distribusi* yaitu untuk menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat maka dampak lanjutan dari peningkatan pajak daerah 20 % pada kesempatan kerja adalah meningkatkan jumlah unit usaha sebanyak 0.04 juta unit atau 0.61 %. Seterusnya dampak pada penyerapan tenaga kerja adalah bertumbuh sebesar 598 orang atau 0.0044 %. Sesuai hasil simulasi ini diperoleh fungsi *distribusi* pajak bertumbuh sebesar 0.614 %. Dampak akhir dari peningkatan pajak daerah 20 % adalah tercermin pada pertumbuhan ekonomi wilayah yang diukur dari indikator pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto. Produk Domestik Regional Bruto bertumbuh sebesar Rp. 65387 juta atau sebesar 0.39 %.

Berdasarkan nilai-nilai pertumbuhan yang diperoleh di atas sebagai dampak dari peningkatan pajak daerah 20 %, dapat dilihat bahwa total penerimaan pajak meningkat sangat besar 20 %. Ini diikuti dengan pertumbuhan fungsi *budgetair* pajak sebesar 9.50 % yang merupakan penjumlahan dari pertumbuhan penerimaan pemerintah (5.60 %) dan pengeluaran pemerintah (3.90 %). Peningkatan pajak daerah memberikan dukungan pertumbuhan bagi anggaran pemerintah daerah baik penerimaan maupun pengeluaran. Dari nilai persentase pertumbuhan anggaran yang ada, diketahui bahwa anggaran tersebut bertumbuh dalam nilai masih relatif kecil, yang mengindikasikan bahwa fungsi *budgetair* pajak relatif belum terwujud penuh dalam pelaksanaannya. Bila dikaitkan dengan fungsinya yaitu untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara sehingga tugas-tugas rutin Negara dan pembangunan dapat terlaksanakan, maka pertumbuhan anggaran yang masih kecil tentu memiliki kemampuan yang juga kecil dalam membiayai pembangunan. Dengan kata lain, ekspansi pembangunan belum dapat terlaksana dengan penuh akibat pertumbuhan anggaran yang kecil.

Dampak peningkatan pajak daerah 20 % mengakibatkan terjadi pertumbuhan fungsi *regulered* pajak sebesar 5.22 % yang merupakan penjumlahan dari pertumbuhan penanaman modal Dalam Negeri (2.51 %) dan penanaman modal Asing (2.71 %). Nilai pertumbuhan investasi yang diperoleh baru sebesar 5.22 % menunjukkan fungsi *regulered* pajak masih relatif kecil tercipta dalam perekonomian Provinsi Jawa Tengah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Dampak peningkatan pajak daerah 20 % mengakibatkan terjadi pertumbuhan fungsi *stabilisasi* pajak sebesar 2.22 % yang merupakan penjumlahan dari pertumbuhan

jumlah uang beredar (1.97 %) dan indeks harga konsumen sebagai indikator kenaikan harga-harga atau inflasi (0.5 %). Stabilisasi menunjukkan keadaan perekonomian yang tidak mengalami fluktuasi besar atau gejolak. Keadaan ini ditandai dengan pertumbuhan inflasi yang stabil yang didukung oleh pertumbuhan jumlah uang beredar yang stabil. Oleh karena itu hasil simulasi fungsi *stabilisasi* pajak sebesar 2.22 % memberi indikasi fungsi *stabilisasi* pajak menjadi terwujud dalam pelaksanaannya.

Dampak peningkatan pajak daerah 20 % mengakibatkan terjadi pertumbuhan fungsi *distribusi* pajak sebesar 0.614 % yang merupakan penjumlahan dari pertumbuhan jumlah unit usaha (0.61 %) dan jumlah penyerapan tenaga kerja (0.0044 %). Sesuai fungsinya (fungsi *distribusi*) maka diharapkan nilai pertumbuhan fungsi ini harus besar. Pertumbuhan fungsi distribusi yang baru mencapai nilai 0.614 % adalah angka yang sangat kecil. Ini mengindikasikan belum besar peran pajak untuk menciptakan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja dalam perekonomian Provinsi Jawa Tengah. Fungsi distribusi diteruskan untuk melihat pertumbuhan PDRB maka pertumbuhannya baru mencapai 0.39 %. Angka ini masih sangat kecil dan dapat dikatakan bahwa peran pajak masih sangat kecil dalam mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Beberapa kesimpulan yang ditarik dari penelitian ini adalah :

1. Rencana penerimaan pemerintah daerah sangat kuat dan efektif dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu pertumbuhan PDRB. Faktor internal masih lemah, dan penerimaan pajak daerah lebih dominan dibanding faktor lain.
2. Pengeluaran pemerintah daerah Jawa Tengah tidak efektif dipengaruhi oleh faktor penarik (pengeluaran rutin dan pembangunan) dan faktor pendorong (penerimaan pemerintah), namun diantara keduanya penerimaan pemerintah yang lebih dominan.
3. Penanaman modal Dalam Negeri sangat kuat dan efektif dihambat oleh beban pajak perusahaan, sebaliknya sangat kuat dan efektif ditarik dengan daya lebih besar oleh pertumbuhan pengeluaran pemerintah daerah.
4. Penanaman modal Asing sangat kuat dan efektif dihambat oleh beban pajak perusahaan, sebaliknya sangat kuat dan efektif ditarik oleh perubahan suku bunga dan pertumbuhan pengeluaran pemerintah daerah.
5. Jumlah uang beredar sangat kuat dan efektif didorong oleh pengeluaran pemerintah, sedangkan inflasi tidak efektif ditarik oleh pertumbuhan jumlah uang beredar.
6. Jumlah unit usaha tidak efektif didorong oleh penanaman modal Dalam Negeri, laju uang beredar dan PDRB. Sedangkan penyerapan tenaga kerja hanya efektif didorong oleh pertumbuhan populasi dan tidak efektif oleh kinerja lapangan kerja.
7. Fungsi-fungsi pajak yakni *budgetair*, *regulated* dan *distribusi* masih relatif kecil terwujud dalam pelaksanaannya ketika penerimaan pajak daerah dipatok naik 20 % sehingga belum maksimal membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin pemerintah daerah dan pembangunan wilayah, kurang menggiring investor mengembangkan investasi, dan belum efektif menciptakan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja.

5.2. Saran dan Implikasi Kebijakan

Untuk meningkatkan fungsi pajak yang masih rendah di atas maka kebijakan yang perlu dilakukan pemerintah daerah adalah menggali dan mengembangkan potensi pajak daerah sehingga pembiayaan pemerintah dan pembangunan lebih maksimal dapat terlaksana. Prioritas pengeluaran pemerintah daerah untuk menstimulasi investasi daerah perlu ditingkatkan disertai penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, Mariam Abdul, Muzafar Shah Habubullah, W.N.W. Azman-Saini, & M. Azali. 2000. The Causal Relationship Between Tax Revenues and Government Spending in Malaysia. University Putra Malaysia, *working Paper*.
- Blackley, P. 1986. Causality Between Revenues and Expenditures of The Size of Federal Budget. *Public Finance quarterly* 14: 139-156.
- Brotodihardjo. R. S. 2003. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Cetakan Pertama. PT. Refika Aditama, Bandung.
- Cheng, B.S. 1999. Causality Between Taxes and Expenditure: Evidence from Latin American Countries. *Journal of Economics and Finance* 23(2): 184-192.
- Deller, Steven, Craig Maher, & Victor Lledo. 2002. Wisconsin Local Government, State Share Revenue and The Illusive Flypaper Effect. University of Wisconsin-Madison, *working paper*.
- Hoover, K.D. & S.M. Sheffrin. 1992. Causation, Spending, and Taxes: Sand in the Sandbox or Tax Collector for The Welfare State? *The American Economics Review* 82 (1): 225-248.
- Joulfaian, D. and R. Mookerjee. 1990. The Interporal Relationship Between State and Local Government Revenues and Expenditures: Evidence from OECD Countries. *Public Finance* 45: 109-117.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, RI. 2009. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sekretariat Negara Republik Indonesia, Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan, Bidang Perekonomian dan Industri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.
- Legrenzi, G. and C. Milas. 2001. Non-linear and Asymmetric Adjustment in the Local Revenue-Expenditure Models: Some Evidence from the Italian Municipalities. University of Milan, *Working Paper*.
- Mangkoesobroto, G. 2001. Kebijakan Ekonomi Publik di Indonesia. PT Gramedia, Jakarta.
- Mankiw, N.G. 2012. Principles of Economics. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Maulida, N.P. 2007. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah. Tesis S2 UII, Yogyakarta.
- Muqodim, 1999. Perpajakan Buku Satu. UII Press, Yogyakarta.
- Prakosa, K.B. 2004. Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah. Studi Empirik di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY. *Jurnal JAAI*.8(2): 101-118.
- Priandana, H.B., 2009. Keberadaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai Pajak Pusat dalam Era Otonomi Daerah. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang.

- Riduansyah, M. 2003. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah. Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor. *Jurnal Makara, Sosial Humaniora*. 7(2): 49-57.
- Rozali, A. 2000, *Pelaksanaan otonomi Luas dan Isu Federalisme sebagai suatu Alternatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Santosa, P.B. dan R.F. Rahayu. 2005. Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kediri. *Jurnal Dinamika Pembangunan*. 2(1): 9-18.
- Sasana, H. 2005. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Studi Kasus di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Dinamika Pembangunan*. 2(1): 19-29.
- Soemitro, R. 2001. *Azas- Azas dan Dasar Perpajakan*. PT Eresco, Bandung.
- Solihin. D. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah : Konsep, Strategi, Tahapan, dan Proses*. Badan Diklat Depdagri, Diklat Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah, Jakarta.
- Suparmoko, M. 2002. *Ekonomika Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Andi Offset, Yogyakarta.
- Syaukani. H.R, Gaffar. A., M.R. Rasyid, 2002, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Cetakan I, Pustaka Pelajar, Jakarta.